

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA JAYA KOPAH
KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk melengkapi dan memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata
Satu Program Studi Ilmu Administrasi Negara



OLEH

**NERI USMANIATI
NPM. 160411074**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL :PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI DESA JAYA KOPAH
KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NAMA :NERI USMANIATI

UNIVERSITAS :ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS :ILMU SOSIAL

JURUSAN :ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI :ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING 1

PEMBIMBING 2

RIKA RAMADHANTI,S.IP.,M.Si
NIDN.1030058402

EMILIA EMHARIS.S.Sos.,M.Si
NIDN.1002059002

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

DESRIADI,S.Sos.,M.Si
NIDN.1022018302

PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 09
Bulan : September
Tahun : 2020

Tim Penguji

Ketua Dewan Sidang

Sekretaris Dewan Sidang

ZUL AMMAR, SE., ME
NIDN.1020088401

DESRIADI, S.Sos., M.Si
NIDN.1022018302

1. **RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si** (Pembimbing 1) (.....)
2. **EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si** (Pembimbing 2) (.....)
3. **SARJAN M, S.Sos., M.Si** (Anggota) (.....)
4. **ALSAR ANDRI** (Anggota) (.....)

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
Dekan,

ZUL AMMAR, SE., ME
NIDN.1020088401

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :NERI USMANIATI

NPM :160411074

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi ini yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Sarjana). Baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun diperguruan tinggi lainnya. karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan pembimbing. adapun bagian-bagian tertentu pada skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain atau sumber lain. sudah saya tulis orang lain. sudah saya tulis sumbernya dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi Akademis berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada pelaksanaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 17 Agustus 2020

NERI USMANIATI

NPM.160411074

MOTTO HIDUP

“hidup tidak menghadiakan barang sesuatupun kepada manusia tanpa manusia itu sendiri bekerja keras”

“Berusahalah jangan sampai telengah walau sedikit saja,karena atas kelengahan kita tidak akan bisa dikembalikan seperti semula”

“Sejarah bukan hanya rangkaian cerita semata,ada banyak pelajaran,kebanggaan dan harta didalam nya”

“pengetahuan adalah kekuatan terbesar”

“manusia tak selamanya benar,dan tak selamanya salah,kecuali la yang selalu mengoreksi diri dan membenarkan kebenaran orang lain atas kekeliruan diri sendiri”

“hanya kebaikan manusia adalah diukur apa yang telah dilakukan/diperbuatnya (ali bin abi tholib)”

KATA PERSEMBAHAN

Teriring rasa puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya atas terselesaikannya penulisan ini, dalam kesempatan berbahagia, Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Siharman dan Ibunda Jasmani yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing penulis sehingga berhasil menyelesaikan Skripsi ini.
2. Saudaraku Roki Yuhendra, Yuhanis, dan Ibnu Oktor yang senantiasa memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan, moril dan materil.
3. Rekan-rekan seperjuangan khususnya mahasiswa program studi SI administrasi nega fakultas ilmu sosial universitas islam kuantan singingi yang seangkatan yang telah memberikan dukungan, kritik dan saran kepada peneliti.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**”.

Ucapan shalawat dan salam, kita limpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang terang benderang untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana sosial program pendidikan strata satu program studi ilmu administrasi Negara pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Dalam penulisan skripsi ini Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi penulisan maupun pembasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. **Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah member izin kepada penulis untuk mengikuti pendidikan program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. **Bapak Zul Ammar, SE.ME,** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kemudahan kepada penulis pada masa belajar.
3. **Bapak Desriadi, S.Sos, M.Si,** selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyusunan skripsi penelitian ini.

4. **Ibu Rika Ramadhanti,S,IP.,M,Si**, selaku pembimbing I yang telah banyak memberi bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk penyelesaian skripsi ini.
5. **Bapak Emilia Emharis S,Sos.,M,Si** selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah mendidik penulis selama perkuliahan, karyawan serta karyawan Fakultas Universitas Islam Kuantan Singingi terimakasih atas bantuannya.
7. Terutama buat keluarga tercinta Ayahanda Siharmanr, Ibunda Jasmani,Abangku Roki Yuhendra Dan Adikku Yuhanis,Ibnu Oktor. yang telah banyak berkorban moril dan material, dan banyak memberikan semangat dan motifasi serta doa sehingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Untuk sahabat-sahabatku Lilis karmila, Eza Astika, Meidiana Sari
9. Seluruh teman-teman seperjuangan Administrasi Negara kelas A angkatan 2016.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga skripsi ini berguna untuk kita dan memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

Teluk Kuantan, 13 Agustus 2020

Penulis

NERI USMANIATI
NPM. 160411074

DAFTAR ISI

Halaman

TANDA PERSETUJUAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PEMBAHASAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Secara Teoritis.....	8
1.4.2 Secara Praktis	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Konsep Administrasi Negara	9
2.1.2 Teori Manajemen	11
2.1.3 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia.....	13
2.1.4 Teori Organisasi	20

2.1.5 Teori Partisipasi.....	21
2.1.5.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat	21
2.1.5.2 Tingkatan Partisipasi.....	25
2.1.5.3 Bentuk-Bentuk Partisipasi	27
2.1.6 Teori Perpajakan.....	28
2.1.6.1 Fungsi Pajak	29
2.1.6.2 Unsur Pajak.....	30
2.1.6.3 Jenis Pajak.....	31
2.1.6.4 Sistem Pemungutan Pajak	32
2.1.6.5 Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	33
2.1.7 Teori Masyarakat Dan Desa.....	34
2.2. Kerangka Pemikiran.....	40
2.3 Hipotesis.....	40
2.4 Definisi Operasional.....	40
2.4.1 Operasional Variabel.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Informan.....	43
3.3 Sumber Data.....	44
3.4 Fokus Penelitian	44
3.5 Lokasi Penelitian.....	45
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	45
3.7 Teknik Analisis Data.....	46
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian	48
BAB IV GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN.....	49
4.1 Sejarah Desa Jaya Kopah.....	49
4.2 Keadaan Geografis.....	49

4.3 Keadaan Penduduk.....	51
4.4 Mata Pencarian.....	51
4.5 Struktur Pemerintahan.....	52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
5.1 Identitas Informan.....	56
5.1.1 Informan Menurut Kelompok Umur.....	56
5.1.2 Informan Menurut Jenis Kelamin.....	57
5.1.3 Informan Menurut Tingkat Pendidikan.....	57
5.2 Pembahasan Dan Hasil Penelitian.....	58
5.2.1 Indikator Pengetahuan Dan Keahlian.....	58
5.2.2 Pekerjaan Masyarakat.....	65
5.2.3 Pendidikan Dan Buta Huruf.....	71
5.2.4 Jenis Kelamin.....	77
5.2.5 Kepercayaan Terhadap Budaya Tertentu.....	82
5.3 Analisis Pembahasan.....	88
BAB VI PENUTUP.....	89
6.1 Kesimpulan.....	89
6.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar2.1 Kerangka Pemikiran.....	40
Gambar4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.....	52
Gambar4.2 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.....	55

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Desa Jaya Kopah.....	4
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa Jaya Kopah.....	4
Tabel 2.1 Operasional Variabel.....	42
Tabel 3.1 Daftar Informan Di Desa Jaya Kopah.....	44
Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	48
Tabel 4.1 Tabel Pembagian Luas Wilayah.....	50
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian.....	52
Tabel 5.1 Identitas Informan Berdasarkan Kelompok Umur.....	56
Tabel 5.2 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	57
Tabel 5.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I Daftar Wawancara.....	93
Lampiran II Dokumentasi	97

ABSTRAK

Evaluasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Metode pengumpulan data dengan wawancara, yang mana jumlah informan untuk Kepala Desa berjumlah 1 Orang, Sekeretaris Desa berjumlah 1 Orang, Ketua BPD berjumlah 1 Orang, RT/RW 3 Orang, Kepala Dusun berjumlah 3 Orang dan Masyarakat berjumlah 6 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan menganalisa data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian diolah dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hasil pengolahan data tersebut. Hasil penelitian ini berada pada item penilaian cukup berpartisipasi. Hal ini dikarenakan dari 5 indikator yang digunakan pada penelitian ini yaitu *pengetahuan dan keahlian, pekerjaan masyarakat, pendidikan dan buta huruf, jenis kelamin, dan kepercayaan terhadap budaya tertentu* seluruhnya cukup berpartisipasi.

Kata Kunci :Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan

ABSTRACT

**Community Participation The Payments Of Land And Building Tax In Jaya
Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency**

**NERI USMANIATI
NPM. 160411074**

This research was conducted in Jaya Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine how to Community Participation in Land and Building Tax Payments in Jaya Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in the study was How to Community Participation in Land and Building Tax Payments in Jaya Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The method of data collection was interview, in which the number of informants for the Village Head was 1 person, the Village Secretary was 1 person, the Chairperson of BPD was 1 person, the Head of Affairs was 3 people, RT/RW 3 people and the Community was 6 people. The data analysis technique used is Qualitative Descriptive, by analyzing data obtained from interviews, then processed and then the researcher make draw conclusions from the results of data processing. the results of the research in the research item are quite good. this is because of the 5 indicators used in this study, were knowledge and expertise, community work, education and illiteracy gendre and belief in certain cultures are simply participate.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara. Karena besarnya pajak seiring laju pendidikan, perekonomian dan stabilitas politik. Sedang penerimaan migas sesuai dengan hukum alam jika dieksploitasi secara terus menerus cenderung akan berkurang dan nantinya akan habis. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah primadona penerimaan negara yang paling potensial. Penerimaan Negara dimanfaatkan oleh pemerintahan untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. Dengan kata lain, pendapatan Negara dari sector pajak merupakan “motor penggerak”

kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana nyata bagi pemerintah untuk mampu menyediakan sarana ekonomi yang ditunjukkan oleh kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan nasional akan berhasil apa bila kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di suatu negara. Jadi dalam pelaksanaannya pemerintah berusaha melibatkan seluruh rakyat dalam pembangunan tersebut. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dengan dasar hukum berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang pajak dan restribusi daerah maka kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB P2) Telah Diserahkan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dan perkebunan (PBB P3) masih berada dibawah kewenangan pemerintah pusat.

Dengan dijadikannya PBB pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Pajak bumi dan bangunan yang pada awalnya termasuk kedalam pajak Negara kemudian dialihkan wewenangnya kepada pemerintah daerah yang termasuk pajak daerah dipungut Oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi cukup dapat diandalkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga dapat meningkatkan kehidupan masyarakat.

Adapun dasar hukum mengenai pajak bumi dan bangunan tercantum dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh bupati/walikota yang bersangkutan kemudian dilimpahkan kepada pemerintah kecamatan sebagai kepala wilayah dengan melibatkan seluruh perangkat yang ada dibawahnya yaitu perangkat desa atau pembantu dan pelaksanaan pemungutan pajak. Dari berbagai jenis pajak yang telah ditetapkan tersebut, salah satu pajak yang dikelola daerah yaitu pajak bumi dan bangunan.

Pajak bumi dan bangunan yang merupakan pajak atas bumi dan bangunan baik yang dimiliki, diperoleh manfaatnya maupun dikuasai pembayar pajak (wajib pajak) tidak akan dapat imbalan secara langsung. Tetapi pajak yang distorkan warga Negara untuk kemakmuran rakyat sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah "self assessment system" dimana sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang besar untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang pada wajib pajak. Di kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Kuantan Tengah tepatnya di desa Jaya Kopah sudah terjalankan pada umumnya.

Wajib pajak juga harus mempunyai surat pemberitahuan tahunan (SPT) yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada saat sekarang ini masih cukup banyak masyarakat yang tidak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak mereka enggan memenuhi kewajibannya yang sekali setahun itu. Penduduk atau rakyat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk memperlancar roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat atau penduduk itu sendiri. Jadi sadar berkorban dan pengorbanan adalah untuk kepentingannya sendiri dari generasi ke generasi. Berikut table wajib pajak di desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Tabel 1.1 jumlah wajib pajak di Desa Jaya Kopah

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Yang Membayar Pajak
1.	2017	378	276
2.	2018	401	313
3.	2019	482	360

Sumber : *kantor kepala desa*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat jumlah wajib pajak di desa Jaya Kopah setiap tahunnya mengalami peningkatan namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak memahami mengenai pajak ini. padahal jumlah penduduk Jaya Kopah cukup banyak, berikut jumlah penduduk Jaya Kopah :

Tabel 1.2 Jumlah penduduk di desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Murbai	430	435	863
2.	Linjuang	225	244	469
3.	Bukit termenung	108	125	233
Jumlah		763	804	1567

Sumber : Kantor Desa Jaya Kopah 2020

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat jumlah penduduk desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang penduduk terbanyak berada pada dusun Murbai, dan dapat dilihat jumlah keseluruhan penduduk Jaya Kopah cukup banyak yaitu

Berdasarkan prariset yang telah dilakukan di desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi masih terlihat permasalahan diantaranya :

1. Masih banyak masyarakat yang sekali tidak tahu mengenai pajak bumi bangunan ini.hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan mengenai pajak bumi bangunan
2. Banyak masyarakat yang kurang sadar mengenai pajak,tidak mengetahui fungsi dari pajak dan untuk apa membayar pajak hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan mengenai pajak bumi bangunan.
3. Tingkat pertanyaan-pertanyaan ditengah masyarakat mengenai bagaimana perhitungan pajak ini,sebab sebagian masyarakat membandingkan kenapa yang mempunyai tanah dan bangunan yang lebih luas ternyata dikenakan pajak PBB yang lebih kecil dibandingkan dengan dirinya yang mempunyai tanah dan bangunan lebih kecil.hal ini menyebabkan ada beberapa masyarakat yang enggan membayarnya karena mereka menilai perhitunggan pajak yang tidak jelas.

Berdasarkan permasalahan diatas hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai pajak ini agar mengetahui fungsi dari pajak dan untuk apa membayar pajak, serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai penghitungan pajak bumi dan bangunan ini sehingga menyebabkan munculnya pertanyaan-pertanyaan di masyarakat yang berakibat enggan masyarakat dalam membayar pajak.

Berdasarkan permasalahan di atas yang menjelaskan permasalahan mengenai kurangnya partisipasi masyarakat untuk membayar pajak,peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana partisipasi masyarakat membayar pajak di desa tersebut untuk itu peneliti mengambil judul penelitian **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA JAYA KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan komponen yang sangat penting di dalam sebuah penulisan karya ilmiah maupun penelitian, oleh sebab itu maka seorang peneliti harus dapat mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti, sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, terarah dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.3 Tujuan Penelitian

Peneliti harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi saat ini dan dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang membutuhkan. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

1.4 Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan daya pikir masyarakat dalam hidup bermasyarakat khususnya mengenai arti penting pajak bumi dan bangunan.

1.4.2. Manfaat Praktis

secara praktis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada:

- a. Wajib pajak untuk menambah kesadaran tentang arti penting membayar pajak bumi dan bangunan untuk pembangunan Bangsa dan Negara.
- b. Pemerintah selalu berupaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam meningkatkan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan teori

2.1.1 Teori Administrasi Negara

Istilah administrasi sering kita dengar terlebih dalam bidang yang berurusan dengan catat-mencatat, pembukuan, surat menyurat, pembuatan agenda, dan sebagainya. Ilmu mengenai administrasi dalam instansi pemerintahan atau suatu perusahaan sangat diperlukan untuk menunjang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah atau perusahaan. Apabila dalam suatu instansi pengelolaan administrasinya baik maka instansi tersebut juga akan dapat berjalan dengan baik.

Administrasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit menurut prajudi Admosudirjo (dalam Ayub, 2007:30) adalah tata usaha office work yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, koreksi, pondensi, dan sebagainya.

Selain menurut prajudi Admosudirjo ada pendapat lain mengenai administrasi dalam arti sempit. Menurut Nawawi (2009:33), administrasi dalam arti sempit adalah mencatat setiap komponen administrasi yang meliputi komponen manajemen, organisasi, maupun kegiatan operasional.

Menurut Siagian (2001:14), administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Siagian (2000:674), Administrasi adalah suatu keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada rasio-rasio tertentu, oleh dua orang atau lebih dalam rangka pencapaian satu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sarana dan prasarana pula.

Berdasarkan pengertian mengenai administrasi menurut para ahli, administrasi dapat dikatakan sebagai proses kerjasama yang melibatkan sedikitnya dua orang untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan sebelum mereka memulai kegiatan.

Menurut priffiner dan presthus yang memberikan penjelasan mengenai administrasi Negara sebagai berikut (Dalam Syafii, 2003:31)

1. Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik
2. Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah
3. Secara ringkas, administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap sejumlah orang.

Ciri-ciri administrasi Negara disebutkan thoha (2008:36-38), sebagai berikut

- a. Administrasi Negara adalah suatu kegiatan yang bisa dihindari setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bisa melepaskan diri

dari sentuhan kegiatan administrasi Negara, baik warga Negara ataupun orang asing.

- b. Administrasi Negara memerlukan adanya kepatuhan hal ini administrasi Negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga Negara mematuhi peraturan-peraturan perundangan yang telah ditetapkan.
- c. Administrasi Negara mempunyai prioritas banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi Negara dari sekian banyak nya tersebut tidak lalu semuanya diborong oleh nya. prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.
- d. Administrasi Negara yang tidak terbatas besar lingkup kegiatan administrasi Negara meliputi seluruh wilayah Negara darat di laut dan di udara.

2.1.2 Teori Manajemen

Menerapkan ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat Anda praktikkan tanpa mengerti apa itu manajemen. Pengertian ilmu manajemen secara umum wajib Anda pahami agar dapat diimplementasikan dengan baik.

Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat

terpenuhi. Sebetulnya, hal ini sudah sering terjadi di kehidupan nyata. Setiap orang juga pasti pernah mempraktikkan ilmu manajemen secara tidak langsung setiap harinya.

Selain itu, manajemen juga dapat diartikan menurut etimologinya. Manajemen berarti sebagai seni mengatur dan melaksanakan, berdasarkan Bahasa Prancis kuno. Manajemen juga dapat diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan menerapkan ilmu manajemen, diharapkan sesuatu yang sedang dikerjakan dapat selesai tepat waktu dan tanpa ada hal yang menjadi sia-sia. Tujuan tercapai karena terorganisir secara baik.

Para ahli memandang ilmu manajemen dengan pengertian beragam. Mary Parker Follet, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Dalam hal ini, manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manager untuk mengarahkan bawahan atau orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya sebuah tujuan.

Beralih ke George Robert Terry, yang mengartikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Menurut Ricky W. Griffin, manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya tujuan tercapai sesuai rencana, dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu.

2.1.3. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurus sdm adalah departemen sumber daya manusia atau dalam bahasa Inggris disebut HRD atau human resource department. Menurut A.F. Stoner manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Tujuan-tujuan MSDM terdiri dari empat tujuan, yaitu :

1. Tujuan Organisasional

Ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia (MSDM) dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Walaupun secara formal suatu departemen sumber daya manusia diciptakan untuk dapat membantu para manajer, namun demikian para manajer tetap bertanggung jawab terhadap kinerja karyawan. Departemen sumber daya manusia membantu para manajer dalam menangani hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia.

2. Tujuan Fungsional

Ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya manusia menjadi

tidak berharga jika manajemen sumber daya manusia memiliki kriteria yang lebih rendah dari tingkat kebutuhan organisasi.

3. Tujuan Sosial

Ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimasi dampak negatif terhadap organisasi. Kegagalan organisasi dalam menggunakan sumber dayanya bagi keuntungan masyarakat dapat menyebabkan hambatan-hambatan.

4. Tujuan Personal

Ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya, minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Tujuan personal karyawan harus dipertimbangkan jika para karyawan harus dipertahankan, dipensiunkan, atau dimotivasi. Jika tujuan personal tidak dipertimbangkan, kinerja dan kepuasan karyawan dapat menurun dan karyawan dapat meninggalkan organisasi.

Tingkatan manajemen secara tradisional dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

- Manajemen Tingkat Atas (*Top Level Management*) Manajemen Tingkat Atas atau sering disebut dengan Top Management (Manajemen Puncak) atau Executives (Eksekutif) adalah Manajer-manajer yang bertanggung jawab atas kinerja manajemen organisasi secara keseluruhan. Mereka memegang jabatan-jabatan seperti CEO (Chief Executive Officer), CFO (Chief Financial Officer), COO (Chief Operational Officer), Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, Direktur Utama dan lain sebagainya. Manajer-manajer yang berada di tingkatan manajemen tingkat atas ini

memiliki tanggung jawab, otoritas dan wewenang maksimum dalam mengendalikan organisasi atau perusahaannya.

Beberapa tugas atau fungsi utama Manajer yang berada di manajemen tingkat atas ini diantaranya adalah sebagai berikut :

- Menentukan Tujuan Perusahaan Manajemen tingkat atas ini merumuskan tujuan utama organisasinya, dapat berupa tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendeknya.
- Membuat kerangka Rencana dan Kebijakan – Manajemen tingkat atas membuat kerangka rencana dan kebijakan untuk mencapai tujuan utama yang telah ditetapkan.
- Mengorganisir kegiatan dan pekerjaan yang akan dilakukan oleh manajer-manajer di tingkat menengah.
- Mengumpulkan dan mengatur sumber daya organisasi atau perusahaan seperti sumber daya keuangan, aset tetap, tenaga kerja dan lain sebagainya untuk melakukan kegiatan sehari-hari dalam organisasi.
- Bertanggung jawab atas kelangsungan dan pertumbuhan hidup organisasi/perusahaan.
- Sebagai penghubung dengan dunia luar seperti bertemu dengan pejabat pemerintah, pemasok, pesaing, pelanggan, media dan lain-lainnya.

Manajemen Tingkat Menengah (*Middle Level Management*)

Manajemen Tingkat Menengah atau Middle Level Management adalah manajer yang berada di bawah Manajer tingkat atas. Mereka biasanya memegang jabatan dengan nama jabatannya seperti General Manager, Plant Manager, Factory

Manager, Regional Manager ataupun Division Manager. Manajer-manajer tingkat menengah ini bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang ditetapkan oleh Manajemen tingkat atas serta bertindak sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat bawah. Manajer-manajer ini juga menjalankan fungsi tingkat atas di departemen atau unit kerja mereka sendiri seperti membuat perencanaan, membuat kebijakan, mengumpulkan dan mengatur sumber daya untuk departemen atau divisi mereka masing-masing.

Adapun fungsi-fungsi dan tugas Manajer di Manajemen Tingkat Menengah ini diantaranya adalah :

1. Meng-interpretasi-kan kebijakan yang disusun oleh Manajemen Puncak (manajemen tingkat atas) dan menjelaskannya ke tingkat manajemen yang lebih rendah. Manajemen tingkat menengah ini berfungsi sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dengan manajemen tingkat bawah.
2. Mengorganisir kegiatan departemennya untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Mengrekrut dan menyeleksi serta menempatkan karyawan yang dibutuhkan oleh department atau unit kerjanya.
4. Memotivasi karyawannya untuk melakukan yang terbaik untuk departemennya. Misalnya menawarkan berbagai insentif dan tunjangan kepada karyawannya sehingga termotivasi dan melakukan yang terbaik agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

5. Mengawasi dan mengarahkan karyawan-karyawan di departemennya.
Contohnya seperti menyiapkan laporan penilaian kinerja karyawannya.
6. Bekerjasama dengan departemen lain untuk kelancaran dalam menjalankan fungsinya.
7. Melaksanakan rencana yang disusun oleh Manajemen tingkat atas.

Manajemen Tingkat Pertama (*First Level Management*) Manajemen Tingkat Pertama atau disebut juga dengan First Level Management atau *First Line Management* adalah Manajemen yang bertanggung jawab atas operasional atau pekerjaan harian para karyawan dalam menghasilkan suatu produk atau layanan. Manajemen tingkat pertama ini biasanya memegang jabatan seperti Department Manager, Section Manager, Superintendent, Mandor atau Supervisor. Para Manajer di manajemen Tingkat pertama ini memiliki otoritas atau wewenang yang terbatas.

Beberapa fungsi dan tugas Manajemen tingkat pertama ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami dan mempelajari masalah dan keluhan-keluhan para pekerja operasional sebelum melaporkannya ke manajemen tingkat menengah.
2. Menjaga kondisi kerja yang baik dan menjaga hubungan yang sehat antara atasan dan bawahan.
3. Menyediakan lingkungan kerja yang sehat and aman untuk para karyawan operasional.
4. Membantu manajemen tingkat menengah untuk merekrut dan menyeleksi pekerja yang sesuai untuk jabatan yang dibutuhkan.

5. Berkomunikasi dengan karyawan dan mendengarkan saran-saran karyawan serta mendorong para pekerja untuk mengambil inisiatif.
 6. Menjaga dan mempertahankan standar kualitas dan memastikan jumlah output produk/layanan sesuai dengan perencanaan.
 7. Bertanggung jawab untuk meningkatkan moral karyawan dan membangkitkan semangat kerja dalam tim.
 8. Meminimalkan pemborosan sumber daya organisasi/perusahaan.
1. Planning (Fungsi Perencanaan) Planning merupakan suatu aktivitas menyusun, tujuan perusahaan lalu dilanjutkan dengan menyusun berbagai rencana-rencana guna mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditentukan. Planning dilaksanakan dalam penentuan tujuan organisasi secara keseluruhan dan merupakan langkah yang terbaik untuk mencapai tujuannya itu. Pihak manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum pengambilan tindakan kemudian menelaah rencana yang terpilih apakah sesuai dan bisa dipergunakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan adalah proses awal yang paling penting dari seluruh fungsi manajemen, karena fungsi yang lain tak akan bisa berjalan tanpa planning.

Perencanaan (planning) dari sudut pandang jenjang manajemen bisa dibagi beberapa jenjang:

- *Top Level Planning* (perencanaan jenjang atas), perencanaan dalam jenjang ini bersifat strategis. memberikan petunjuk umum, rumusan tujuan, pengambilan keputusan serta memberikan petunjuk pola penyelesaian dan sifatnya menyeluruh. top level planning ini penekanannya pada tujuan

jangka panjang organisasi dan tentu saja menjadi tanggung-jawab manajemen puncak.

- *Middle Level Planning* (perencanaan jenjang menengah), dalam jenjang perencanaan ini sifatnya lebih administratif meliputi berbagai cara menempuh tujuan dari sebuah perencanaan dijalankan. dan tanggungjawab perencanaan level ini berada pada manajemen menengah
- *Low Level Planning* (perencanaan jenjang bawah) perencanaan ini memfokuskan diri dalam menghasilkan sehingga planing ini mengarah kepada aktivitas operasional. dan perencanaan ini menjadi tanggung-jawab manajemen pelaksana

2. *Organizing* (Fungsi Pengorganisasian) *Organizing* adalah suatu aktivitas penagturan dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang lainnya yang dimiliki oleh perusahaan untuk bisa melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dan mencapai tujuan utama perusahaan. Dalam bahasa yang lebih sederhana *organizing* merupakan seluruh proses dalam mengelompokkan semua orang, alat, tugas tanggung-jawab dan wewenang yang dimiliki sedemikian rupa hingga memunculkan kesatuan yang bisa digerakkan dalam mencapai tujuan

3. *Directing* (Fungsi Pengarahan) *Directing* alias fungsi pengarahan merupakan fungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dengan optimal dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis, sehat dan yang lain.

4. *Controlling* (Fungsi Pengendalian / Pengawasan) *Controlling* merupakan kegiatan dalam menilai suatu kinerja yang berdasarkan pada standar yang sudah dibuat perubahan atau suatu perbaikan apabila dibutuhkan.

2.1.4 Teori Organisasi

Organisasi telah diskripsikan oleh para ahli sebagai sistem formal yang menetapkan bagaimana anggota diterima, bagaimana kepemimpinan dipilih, dan bagaimana keputusan di buat untuk mencapai perusahaan atau organisasi.

Menurut Robbins (dalam Edison, dkk 2016:49) menyatakan bahwa Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan

Teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi, Salah satu kajian teori organisasi, diantaranya membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut. Selain itu, dipelajari bagaimana sebuah organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang didalamnya maupun lingkungan kerja organisasi tersebut.

Organisasi adalah studi tentang bagaimana organisasi menjalankan fungsinya dan bagaimana mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang-orang yang bekerja di dalamnya ataupun masyarakat di lingkup kerja mereka. Organisasi adalah suatu konsepsi, pandangan, tinjauan, ajaran, pendapat atau pendekatan tentang pemecahan masalah organisasi agar lebih berhasil dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Masalah adalah segala sesuatu yang

segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kepentingan organisasi yang memerlukan pemecahan dan pengambilan keputusan.

2.1.5 Teori Partisipasi

2.1.5.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu "*participation*" yang berarti pengambilan bagian atau pengikut sertaan. Menurut Pidarta (Dwiningrum 2011:50), partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Adapun pengertian partisipasi masyarakat berdasarkan para ahli:

Menurut Soemarto (2003:120) Partisipasi adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran ikut serta mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepadapencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.

Menurut Bornby, 1974 (Theresia dkk, 2014:196) Partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. kamus sosiologi (Theresia dkk, 2014: 196) bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan

seseorang didalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat nya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Menurut Hunryar dan Hecman (Dwiningrum 2011:51) Partisipasi adalah sebagai keterlibatan mental dan emosiaonal individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka.

Menurut Davis dan Newstrom (1985:179)Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab pencapaian tujuan itu.

Verhagen, 1979 (Theresia dkk, 2014:197)Partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat.Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan mengenai:

- 1.Kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki.
- 2.Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri.
- 3.Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan.
- 4.Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Menurut Pasaribu dan Simanjuntak, (1986:345)Partisipasi masyarakat, berarti masyarakat ikut serta yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai saat ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta, karena anggapan bahwa hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan dan dibiayai utama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak.

Menurut Dusseldorp, 1981 (Theresia dkk, 2014:200) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

- 1.Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
- 2.Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
- 3.Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi
- 4.Menggerakkan sumberdaya masyarakat.

Menurut Cohen dan Uphoff (Dwiningrum 2011:51) membedakan partisipasi menjadi empat jenis antara lain:

- 1.Partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan suatu program merupakan satu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri. Adapun 4 indikator dari partisipasi dalam pelaksanaan antara lain: keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan partisipasi, kesediaan memberikan sumbangan pikiran dan keahlian, kesediaan memberikan sumbangan uang dan materi, dan tanggung jawab terhadap keberhasilan partisipasi.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi ini tidak lepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar presentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. Partisipasi dalam evaluasi, partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Menurut Theresia dkk, (2014:206-207) tumbuh dan berkembangnya partisipasi dalam proses pembangunan, mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya untuk terlibat

secara aktif didalam proses pembangunan. Artinya, tumbuh berkembang nya partisipasi memberikan indikasi adanya pengakuan dari pemerintah bahwa masyarakat bukanlah sekedar objek atau penikmat hasil pembangunan melainkan subyek atau pelaku pembangunan yang memiliki kemampuan dan kemauan yang dapat diandalkan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil- hasil pembangunan.

Dari beberapa definisi partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh beberapa ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat adalah sesuatu yang melibatkan masyarakat bukan hanya kepada proses pelaksanaan kegiatan nya saja, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam hal perencanaan dan pengembangan dari pelaksanaan program tersebut, termasuk menikmati hasil dari pelaksanaan program tersebut. Penulis berpendapat teori yang tepat digunakan untuk partisipasi masyarakat dalam membayar PBB adalah teori dari Cohen dan Uphoff (Dwiningrum2011:51). Teori tersebut salah satu nya berisi tentang partisipasi dalam pelaksanaan, dimana penulis ingin melihat pelaksanaan dari partisipasi masyarakat dalam membayar PBB setiap tahun nya.

2.1.5.2 Tingkatan Partisipasi

Menurut Arnstein (Dwiningrum 2011:64) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat yang didasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, tiap tangga dibedakan berdasarkan *“corresponding to the extent of citizen’s power in determining the plan and/or program”*. Secara umum dalam model ini ada tiga derajat partisipasi masyarakat:

- a. Tidak partisipatif (*Non Participation*)
- b. Derajat semu (*Degrees of Tokenism*)
- c. Kekuatan masyarakat (*Degrees of Citizen Powers*)

Pada tingkatan kedua dalam tangga partisipasi masyarakat adalah partisipasi semu. Partisipasi semu sendiri terbagi menjadi tiga bagian yaitu pemberian informasi, konsultasi, penentruman, pemberian informasi menurut Arnstein adalah masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan aspirasi dan pemerintah juga memberikan kesempatan namun aspirasi mereka sulit direalisasikan oleh pemerintah. Setelah pemberian informasi terdapat konsultasi, konsultasi sendiri adalah masyarakat dapat memberikan aspirasi dalam penerapan suatu kebijakan dan ada kesempatan untuk didengar dan diajukan oleh pemerintah. Namun tetap tidak ada jaminan untuk diimplementasikan oleh pemerintah. Dan bagian yang terakhir adalah penentruman, penentruman sendiri adalah masyarakat yang dapat memberikan aspirasi maka aspirasi tersebut dapat didengar dan diberi kesempatan untuk memberikan saran tetapi saran tersebut tidak mendapat jaminan untuk dapat diimplementasikan karena pemerintah mempunyai hak untuk dapat membuat suatu kebijakan diterapkan atau tidak diterapkan Pada tingkatan ketiga dalam tangga partisipasi masyarakat adalah kekuatan masyarakat. Kekuatan masyarakat sendiri terbagi menjadi tiga bagian yaitu kemitraan, kuasa yang didelegasi, dan kendali warga.

Kemitraan menurut Arnstein adalah masyarakat yang dapat memberikan aspirasi tetapi masyarakat dengan tingkat partnership dapat bernegosiasi sehingga terjadinya timbal balik dan memiliki hubungan yang erat dengan tradisional power

holder. Setelah kemitraan terdapat kuasa yang didelegasi, kuasa yang didelegasi menurut Arnstein adalah masyarakat yang dapat didelegasikan kekuasaan sehingga masyarakat bertanggung jawab atas pendelegasian kekuatan walaupun tidak sepenuhnya. Dan terakhir dari tingkat partisipasi dalam kekuatan masyarakat adalah kendali warga, maksud dari kendali warga adalah masyarakat yang dapat didelegasikan kekuasaan sehingga masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas pendelegasian kekuasaan.

2.1.5.3 Bentuk-Bentuk Partisipasi

Partisipasi secara sederhana bisa diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam suatu pembangunan. Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa seseorang, kelompok atau masyarakat dapat memberikan sumbangan yang akhirnya dapat membantu keberhasilan dari sebuah

1. Pengetahuan dan keahlian dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut.
2. Pekerjaan masyarakat biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi untuk proyek tertentu.
3. Tingkat pendidikan dan buta huruf faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.
4. Jenis kelamin sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih mengagap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki

dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan.

5.Kepercayaan terhadap budaya tertentu masyarakat dengan tingkat eterogenitas yang tinggi,terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan.

2.1.6 Teori Perpajakan

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat di tunjukan secara langsung. Pengertian Pajak menurut para ahli dan UU : Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan, tidak mendapatkan prestasi dan langsung dapat ditunjuk untuk pembiayaan pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kas ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak

mendapat prestasi kembali secara langsung, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli

1. Pengertian pajak menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku *De Overheidsmiddelen Van Indonesia* (terjemahan): Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum).
3. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku *De Economische Betekenis Belastingen* (terjemahan): Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individu
4. Pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul "Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong" menyatakan: "Pajak adalah iuran berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum.

2.1.6.1 Fungsi Pajak

1. Fungsi penerimaan (Fungsi Budgeter) Pajak berfungsi sumber dana yang diperuntukan pemerintah. sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak kedalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri..
2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras. Dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah (Waluyo, 2011:6).

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.

2.1.6.2 Unsur Pajak

Ciri-ciri atau unsure-unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah (Waluyo, 2002:10):

1. pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukan masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*
5. pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur

2.1.6.2 Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2011:12) pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis, antara lain:

1. Menurut Golongan

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung.

- a) Pajak Langsung, yaitu Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain . Contohnya: Pajak Bumi dan bangunan (PBB) dan pajak penghasilan.
- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan dan dilimpahkan kepada orang lain, Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

2. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

- a) Pajak Objektif, Pajak yaitu pajak yang hanya memperhatikan objek tanpa memperhatikan wajib pajak. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.

b) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

a) Pajak Daerah (Lokal), Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya.

b) Pajak Negara (Pusat), Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.

2.1.6.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah menganut beberapa sistem seperti yang di jelaskan dalam buku karya Mardiasmo (2011:7). Seperti yang ungkapakan sebagai berikut ini:

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.

c. Utang Pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus

2. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. Withholding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.6.4. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan pembayaran pajak bumi dan bangunan secara rutin setiap tahunnya merupakan kewajiban untuk wajib pajak yang memiliki aset tersebut. Selain itu, pajak ini juga dikenakan ketika adanya transaksi jual beli antara dua pihak dalam rangka pemindahan kepemilikan atas aset tertentu berupa tanah dan bangunan. Untuk itu terdapat aturan pajak bumi dan bangunan 2019 yang awal tahun lalu diterbitkan. Peraturan yang diterbitkan sendiri secara spesifik ditujukan

untuk memberikan arahan penilaian tanah atau bangunan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Aturan yang dituangkan dalam Pedoman Penilaian Bumi dan / atau Bangunan ini masuk dalam peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.07/2018. Kembali lagi, aturan ini diberikan agar pemerintah daerah dapat dengan tepat melakukan taksiran NJOP yang bernilai relevan dan sesuai dengan keadaan dilapangan serta nilai idealnya dipasaran.

Sebenarnya peraturan baru ini tidak diberlakukan tanpa dasar. Awal mula pemberlakuan ini adalah kajian pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 yang mengamanatkan NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah setiap 3 tahun sekali.

Pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dengan berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang pajak dan Retribusi Daerah maka kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. PBB sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3) masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

2.1.7 Teori Masyarakat Dan Desa

Secara umum, dalam kehidupan masyarakat di pedesaan dapat dilihat Beberapa karakteristik yang dimiliki, sebagaimana dikemukakan oleh Roucek dan

Warren, dalam Jefta(1995) yaitu :

- a.Mereka memiliki sifat yang homogeny dalam hal mata pencaharian, nilai-nilai budaya, sikap dan tingkah laku.
- b.Kehidupan di desa lebih menekankan keterlibatan anggota keluarga dalam kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Keluarga juga berperan sebagai pengambil keputusan yang final dalam memecahkan persoalan.
- c.Faktor geografis sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, misalnya adanya keterikatan, anggota masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya.
- d.Hubungan sesama anggota keluarga masyarakat lebih intim dan jumlah anak pada keluarga inti lebih banyak.

Apa yang dikemukakan di atas, tidak berarti berlaku di setiap desa karena bisa saja salah satu atau beberapa cirri yang sudah ada tidak kelihatan lagi akibat terjadinya perkembangan dalam masyarakat desa itu sendiri.

Selanjutnya Rogers dkk (1969) juga mengemukakan hal yang hampir sama tentang masyarakat desa, namun ia lebih menjelaskan dari segi petani, yaitu

- a. Adanya rasa ketidakpercayaan timbal balik antara petani dengan yang lain. Hal ini bisa terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan hidup , sesama anggota komunitas salaing berebut untuk mendapatkan sumber-sumber ekonomi yang terbatas. Misalnya tanah, adalah sumber produksi

usaha tani yang terbatas sementara jumlah penduduk semakin bertambah disertai pula dengan pekerjaan di bidang pertanian tidak menjamin sehingga petani berusaha di luar sektor pertanian.

- b. Pandangan yang sempit dikalangan petani Pandangan yang sempit menyebabkan kesempatan untuk maju selalu terbatas. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan-ungkapan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Misalnya Jawa, mengungkapkan bahwa “lakune wong urip gumantung nasibe dewe-dewe” (orang hidup itu tergantung nasibnya sendiri-sendiri)
- c. Ketergantungan dan curiga terhadap pemerintah Hubungan antara petani dengan pemerintah cenderung kurang harmonis bila pemerintah memperlihatkan gaya kepemimpinan yang otoriter. Dengan demikian tidak adanya keterbukaan dan kebebasan menentukan pilihan menimbulkan rasa curiga terhadap pemerintah.
- d. Familisme Adanya rasa kekeluargaan dan keakraban diantara orang-orang yang memiliki tali kekerabatan
- e. Rasa enggan untuk menerima atau menciptakan ide-ide baru Kondisi ini ada dalam masyarakat desa yang relative belum berkembang disebabkan oleh sumberdaya alam yang cukup menghidupi mereka. Masyarakat baru menerima ide-ide baru kalau sumberdaya alamnya tidak mendukung lagi atau mulai berkurang.

f. Fatalisme Sikap ini tercermin pada pandangan seseorang yang menganggap bahwa keberhasilan bukanlah hasil kerja keras seseorang, tetapi berada diluar dirinya (supernatural)

g. Keinginan yang sangat rendah untuk menggapai masa depan

Dalam masyarakat desa terutama mereka yang rentan terhadap kemiskinan, cenderung ditemukan keinginan yang sangat rendah baik dibidang pendidikan maupun jenis pekerjaan lain (terutama anak-anak dan wanita)

h. Kekurangan atau ketiadaan sifat untuk dapat mengekang diri

untuk mengorbankan kenikmatan sekarang demi pencapaian keuntungan yang lebih besar di masa depan. Keadaan ini disebabkan karena petani selalu diliputi oleh situasi yang tidak menentu akibat tergantungnya mereka dengan alam. Misalnya nelayan, bila mendapatkan hasil yang berlebih, mereka cenderung membeli barang kebutuhan rumah tangga seperti elektronik untuk dinikmati dalam “semusim”. Bila musim berikutnya kurang beruntung, apa yang telah dibeli, dijual kembali dengan harga yang lebih murah.

i. Pandangan yang terbatas dengan dunia luar

Hal ini diketahui pada kemampuan masyarakat tersebut dalam menyerap sesuatu yang datang dari luar, misalnya pesan-pesan pembangunan yang disampaikan apakah dapat diterima, dipahami dan dipraktekkan oleh masyarakat tersebut.

j. Memiliki derajat empati yang rendah

Rendahnya empati yang disebabkan oleh jarak sosio psikologis maupun pengetahuan yang terbatas dari masyarakat lain yang sudah lebih maju.

Beberapa kecenderungan karakteristik-karakteristik diatas, dikemukakan secara umum, namun tidak semua kecenderungan ini ada pada setiap masyarakat desa sebab tergantung pada seberapa jauh tingkat perubahan (kemajua) yang telah dicapai oleh masyarakat desa.

1. Tipologi Masyarakat Desa

Tipologi tentang masyarakat desa dapat ditinjau dari beberapa segi (Jefta, 1995), yaitu :

a. Dari segi kegiatan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

- Desa pertanian, dimana semua anggota masyarakatnya terlibat di bidang pertanian
- Desa industry, dimana pendapatan masyarakat lebih banyak berhubungan dengan industry kecil atau kerajinan yang ada di desa tersebut
- Desa nelayan atau desa pantai, yaitu pusat kegiatan dari seluruh anggota masyarakat yang berusaha dibidang perikanan (pantai, laut dan darat).

2. Dari segi pola pemukiman

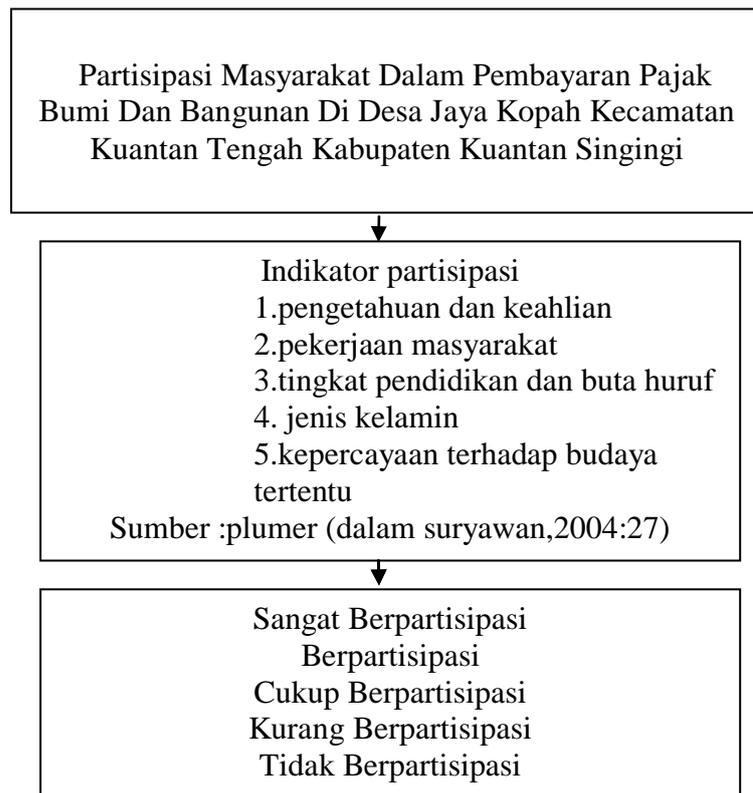
- *Farm village type*, yaitu suatu desa yang didiami secara bersama dengan sawah ladang disekitar tempat tersebut. Tipe ini kebanyakan terdapat di Asia Tenggara termasuk Indonesia khususnya Jawa. Tradisi sangat

dipegang kuat, hubungan sesama individu dalam proses produksi usaha tani telah bersifat komersial karena masuknya teknologi modern.

- *Nebulous farm village type*, yaitu suatu desa dimana sejumlah orang yang berdiam di suatu tempat dan sebagian lainnya menyebar diluar tempat bersama sawah lading mereka. Tipe ini kebanyakan terdapat di Asia Tenggara dan Indonesia, khususnya di Sulawesi, Maluku, Irian Jaya dan sebagian di Jawa. Di Kalimantan bisa juga dijumpai karena masih terdapat pola bertani atau berladang berpindah. Tradisi dan gotong royong serta kolektifitas sangat kuat di kalangan anggota masyarakat.
- *Aranged isolated farm village type*, yaitu suatu desa dimana orang berdiam disekitar jalan-jalan yang berhubungan dengan pusat perdagangan dan selebihnya adalah sawah dan ladang mereka. Tipe ini kebanyakan dijumpai di Negara-negara Barat Tradisi disini kurang kuat, individualistis lebih menonjol, lebih berorientasi pada bidang perdagangan.
- *Pure isolated farm village type*, yaitu desa dimana orang-orang berdiam tersebar bersama sawah lading mereka masing-masing. Tipe ini kebanyakan di negara-negara Barat. Tradisi kurang kuat, individualistis menonjol dan juga berorientasi perdagangan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Peneliti Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : modifikasi peneliti 2020

2.3 Hipotesis Kerja

Hipotesis kerja adalah dugaan sementara yang penulis simpulkan berdasarkan observasi. Hipotesis dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

2.4 Definisi Operasional

Pengetahuan dan keahlian dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut.

Pekerjaan masyarakat biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi untuk proyek tertentu.

Tingkat pendidikan dan buta huruf Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.

Jenis kelamin sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih mengagap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan.

Kepercayaan terhadap budaya tertentu masyarakat dengan tingkat eterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan.

Table 2.1 Operasional Variabel Penelitian Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Jaya

Konsep	variabel	Indikator	Item yang dinilai	Ukuran
Plumer (dalam suryawan 2004:27)	partisipasi	1. pengetahuan dan keahlian	- pengetahuan - keahlian	Sangat Berpartisipasi Berpartisipasi Cukup Berpartisipasi Kurang Berpartisipasi Tidak Berpartisi
		2. pekerjaan masyarakat	- pekerjaan - pendapatan	Sangat Berpartisipasi Berpartisipasi Cukup Berpartisipasi Kurang Berpartisipasi Tidak Berpartisipasi
		3. tingkat pendidikan dan buta huruf	- pendidikan - angka buta huruf - tingkat pengangguran - tingkat pengangguran	Sangat Berpartisipasi Berpartisipasi Cukup Berpartisipasi Kurang Berpartisipasi Tidak Berpartisipasi
		4. jenis kelamin	- laki-laki - perempuan	Sangat Berpartisipasi Berpartisipasi Cukup Berpartisipasi Kurang Berpartisipasi Tidak Berpartisipasi
		5. kepercayaan terhadap budaya tertentu	-kepercayaan terhadap pemerintah pengelolaan pajak dan fungsinya - budaya sadar pajak	Sangat Berpartisipasi Berpartisipasi Cukup Berpartisipasi Kurang Berpartisipasi Tidak Berpartisipasi

Sumber : modifikasi penelitian 2020

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian survey, dengan tingkat eksplanasi deskriptif, dengan menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Sugiono (2014:14) data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Penelitian dengan pendekatan naturalistic/kualitatif kebanyakan datanya adalah data kualitatif walaupun tidak menolak data dan analisis secara kualitatif.

3.2 Informan

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bungin, 2007:76).

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Informan ini harus banyak pengalaman tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangannya dari dalam tentang nilai-nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat.

Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, maka diperlukan informan. Pemilihan informan dalam penelitian yang akan dilakukan dengan purposive sampling.

Menurut Sugiono (2014:96) purposive sampling adalah teknik pengumpulan sample dengan pertimbangan tertentu. Diambil dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap informan yang diambil tersebut memiliki informan yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan ini.

Tabel 3.1 :Daftar Informan Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala desa	1
2.	Sekeretaris desa	1
3.	Ketua BPD	1
4.	RT/RW	3
5.	Kepala Dusun	3
6.	Masyarakat	6
	Jumlah	15

Sumber: Modifikasi Peneliti Tahun 2020

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari penelitian lapangan atau data yang secara langsung berasal dari sumbernya yaitu di peroleh dari informan melalui wawancara.

3.3.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data ini di peroleh melalui laporan, dokumen-dokumen dari instansi berhubungan dengan penelitian.

3.4 Fokus Penelitian

Tidak ada satupun penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus. Ada dua maksud yang peneliti ingin mencapainya dalam menetapkan fokus adalah sebagai berikut : penetapan fokus dapat membatasi studi atau membatasi bidang inkukiri, yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. Mungkin data cukup menarik, tetapi jika dipandang relevan data itu tidak, akan dihiraukan. (Moleong 2002:62). Fokus penelitian ini merupakan batasan-batasan kajian dari variabel yang diangkat dalam penelitian ini. Ada maksud yang peneliti inginkan untuk mencapainya dalam

menetapkan fokus penelitian adalah partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan dengan ditetapkan lokasi dalam penelitian akan dapat lebih mudah untuk mengetahui tempat dimana suatu penelitian dilakukan. Lokasi yang digunakan dalam Penelitian ini adalah di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi data yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini, maka menggunakan teknik yaitu :

3.6.1 Wawancara

Menurut sugiono (2014:157) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.

3.6.2 Observasi

Menurut Sutrisno (dalam Sugiono 2014:165) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja.

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Sugiono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya karya seni yang berupa gambar, patung film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012: 339) kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan.

3.7.1 Reduksi Data

Silalahi (2012: 339) selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat partisipasi, dan menulis memo). Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan di verifikasi. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

3.7.2 Penyajian Data

Silalahi (2012: 340) Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara

keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian singkat, foto atau gambar dan sejenisnya.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Silalahi (2012: 341) Penarikan Kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Peneliti berusaha untuk menganalisa dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat hasil reduksi dan tetap berorientasi pada rumusan masalah serta tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain sehingga memperoleh penarikan kesimpulan sebagai jawaban setiap permasalahan.

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2: Jadwal Penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Jenis Kegiatan	2019/2020										
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Pembuatan Proposal	x										
2.	Pengajuan Judul Proposal	x										
3.	Bimbingan Proposal		x	X	x							
4.	Seminar Proposal					X						
5.	Revisi Proposal							x				
6.	Pengumpulan Data							x				
7.	Pengolahan Data								x			
8.	Bimbingan Skripsi										x	
9.	Sidang Skripsi											x
10.	Revisi Skripsi											x

Sumber:olahan peneliti

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Jaya Kopah

Desa Jaya adalah salah satu desa dari 6 desa di kenegerian kopah. Pemekaran desa Jaya pada tahun 1982, desa Jaya merupakan desa interline dan desa pertumbuhan yang wilayah luas di 6 desa kenegerian kopah dan penduduk terbanyak di banding dengan desa yang ada di wilayah kenegerian kopah. Desa Jaya dalam kepemimpinan dan panutan masyarakat pada 2 periode di pimpin oleh Syamsuman (Alm), dilanjutkan melalui pemilihan oleh rakyat terpilih nursaman masa bakti 6 tahun, kemudian periode selanjutnya di pimpin oleh amirusman (Alm) selama 8 tahun, pada tahun 2006 s/d 2012 di pimpin oleh erdison dan sekretaris desa Rahman Ali, kemudian pada tahun 2012 kembali di adakan pemilihan dan desa jaya di pimpin oleh Setiadi Yendra dengan sekretari desa Yanto, 1 tahun 6 bulan desa jaya di pimpin oleh Pj kepala desa Abdul Kasim, dan pada saat ini desa jaya di pimpin oleh **MATNUR** dengan sekretaris desa **ERICK GUSPI YONDRA,S.P.** Pada tahun 2007 desa Jaya terpilih sebagai peringkat ke II desa terbaik Se-kuansing.

4.2 Keadaan Geografis

Desa Jaya Kopah merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Desa ini berada di tengah Kecamatan Kuantan Tengah. Adapun yang menjadi batas-batas wilayah di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Munsalo Kopah
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Titian Modang Kopah
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kopah
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Titian Modang

Desa Jaya Kopah memiliki Luas Wilayah yang terbagi atas :

Tabel 4.1 : Tabel pembagian luas wilayah Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Wilayah	Luas Wilayah (Ha)	Persentase
1.	Pemukiman	45	50%
2.	Pertanian sawah	5	5,5%
3.	Perkantoran	1	1,1%
4.	Sekolah	1	1,1%
5.	Jalan	37	41,1%
6.	Lapangan sepak bola	1	1,1%
	Jumlah	90	100%

Sumber : Data Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki orbitasi (jarak tempuh dari Pusat Pemerintahan) yaitu :

1. Jarak ke ibu kota Kecamatan terdekat : 5 Km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan : 15 Menit
3. Jarak ke ibu kota Kabupaten : 5 Km
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 15 Menit

Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ini terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Linjuang, dusun Murbai dan Dusun Bukit Termenung, dan pola tata dusun dipengaruhi oleh keadaan geografisnya yang merupakan daerah yang terletak dipertengahan kecamatan, yaitu pola perkembangan yang berkelompok dan menyebar memanjang mengikuti jalan desa

Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Keadaan iklim di desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu tropis dimana terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

4.3 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi lebih kurang 2000 jiwa. Di Jaya kopah Kecamatan Kuantan Tengah penduduknya relative sedikit karena dengan luas wilayah yang hanya 90 Ha. Penduduk yang ada di desa Jaya Kopah banyak terdapat di dusun Murbai. Dengan demikian untuk melihat keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2 : Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Desa	Jenis Kelamin		Jiwa
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Jaya Kopah	763	804	1567
	Jumlah	763	804	1567

Sumber : Data penduduk Desa Jaya Kopah 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah penduduk keseluruhan 1567, jumlah penduduk laki-laki di Desa Jaya Kopah 763 jiwa dengan persentase 48,6% dan jumlah penduduk perempuan 804 jiwa dengan persentase 51,3%.

4.4 Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus akan turut menentukan kelangsungan hidup mereka sendiri. Mata pencaharian penduduk Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi beraneka ragam, sebagian besar penduduk desa ini hidup

sebagai petani dan berkebun.Selain itu ada juga yang berdagang, guru, ASN, tukang, bidan/perawat, TNI/Polri, pensiunan, supir angkutan, buruh dan swasta. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian penduduk jaya kopah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4 : Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1.	Petani	667
2.	Pedagang	94
3.	ASN	87
4.	Tukang	51
5.	Guru	70
6.	Bidan/Perawat	21
7.	TNI/Polri	15
8.	Pensiunan	70
9.	Supir angkutan	15
10.	Buruh	50
11.	Swasta	70
12.	Peternak	80
13.	Pelajar/Belum bekerja	150
	Jumlah	1440

Sumber :Data penduduk Desa jaya Kopah Tahun 2020

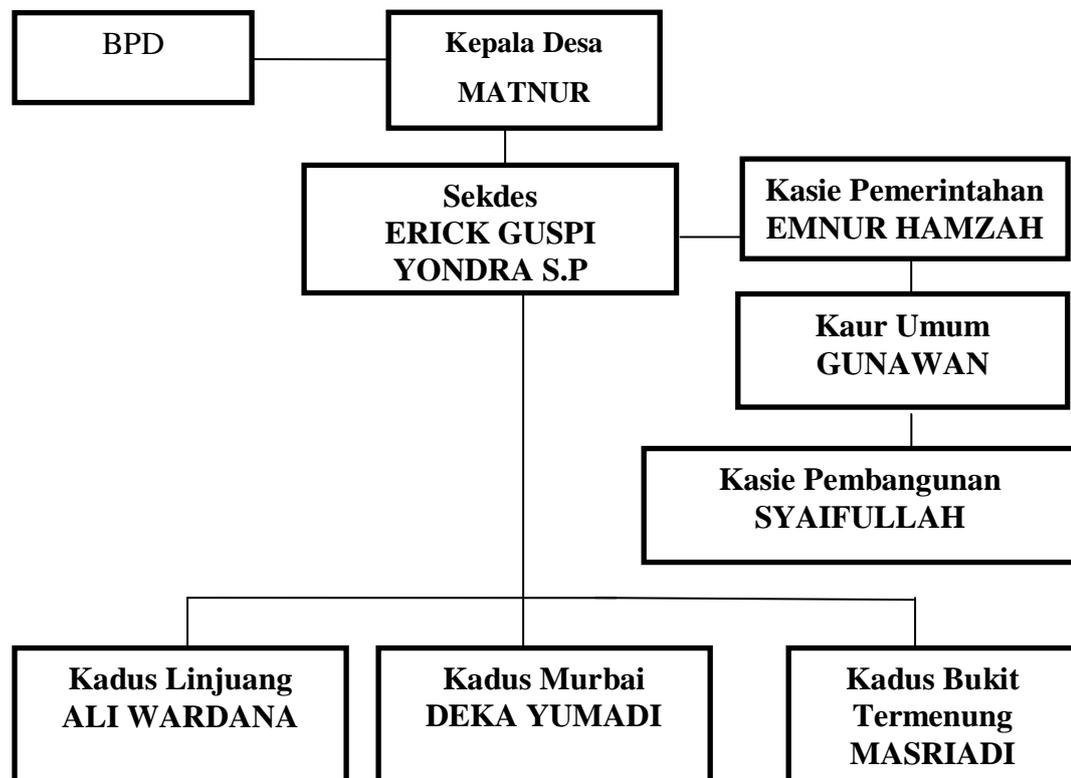
Dari tabel diatas dilihat bahwa sebagian besar dari penduduk Desa Koto Sentajo adalah sebagian petani yaitu sebanyak 667 orang. pedagang 94 orang, ASN 87 orang, tukang 51 orang, guru 70 orang , bidan/perawat 21 orang, TNI/Polri 15 orang, pensiunan 70 orang, supir angkutan 15 orang, buruh 50 orang, swasta 70 orang, peternak 80 orang dan pelajar/belum bekerja 150 orang

4.5 Srtuktur Pemerintahan

Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan berbagai pelayanan kepentingan umum kepada masyarakat mulai masalah keamanan, kesehatan, kependudukan, serta ketertiban dan lain sebagainya.Menurut Sondang P. Siagian

organisasi yang bagus menciptakan dan mendudukan orang-orang dalam satu jabatan. Untuk mengetahui struktur organisasi pemerintah di Desa jaya k pah Kecamatan kuantan tengah Kabupaten Kuantan Singingi dapat kita lihat pada struktur berikut ini :

Gambar 4.1 :Strukur Organisasi Pemerintahan Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Jaya Kopah kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam melaksanakan tugas pelaksanaan pemerintahan di Desa Jaya Kopah kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, para aparatur pemerintahan desa Jaya Kopah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yaitu :

1. Kepala desa yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu kepala desa juga memiliki wewenang, hak dan kewajiban. dan kepala desa memiliki larangan yang harus dipatuhi dengan konsekuensi pemberian sanksi administratif yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang yang ada.
2. Perangkat desa (Sekretaris, Kaur dll) memiliki tugas dan fungsi membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Selain itu tugas dan wewenang perangkat desa juga memiliki larangan yang harus dipatuhi dengan konsekuensi pemberian sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan.

Gambar4.2 :Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Kantor Desa Jaya Kopah 2020

Dalam melaksanakan tugas pelaksanaan pemerintahan di Desa Jaya Kopah kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, pemerintahan Desa Jaya Kopah juga memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu anggota BPD yang memiliki tugas dan fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. BPD juga memiliki larangan yang harus dipatuhi dengan konsekuensi pemberian sanksi administratif yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang yang ada.

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Informan

Informan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 15 orang pemerintah desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang berkompeten dalam memberikan penilaian terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun data yang diberikan oleh informan kemudian dikumpulkan berdasarkan klasifikasi indikator dan kerangka pemikiran penelitian, setelah itu dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kemudian disediakan dalam bentuk tabel dan penjelasan berupa narasi yaitu uraian dari isi tabel yang tersedia, sebagai berikut :

5.1.1 Informan Menurut Kelompok Umur

Uraian mengenai identitas informan berdasarkan kelompok dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1: Identitas Informan Dalam Penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Kelompok Umur

No	Usia	Jumlah	
		Orang	Persentase
1.	25-35 Tahun	12	80%
2.	36-40 Tahun	3	20%
	Jumlah	15	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.1 diatas dapat diamati bahwa berdasarkan umur informan maka untuk yang berumur 25 s/d 35 tahun sebanyak 12 orang (80%). Umur 36 s/d 40 tahun sebanyak 3 orang (20%).

5.1.2 Informan Menurut Jenis Kelamin

Uraian identitas informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2 :Identitas Informan Dalam Penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	
		Orang	Persentase
1.	Laki-laki	9	60%
2.	Perempuan	6	40%
	Jumlah	15	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat informan untuk penelitian Evaluasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi lebih banyak didominasi oleh Laki-laki yaitu sebanyak 9 orang (60%), sedangkan yang perempuan sebanyak 6 orang (40%).

5.1.3 Informan Menurut Tingkat Pendidikan

Uraian identitas informan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.3 :Identitas Informan Dalam Penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No .	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		Orang	Persentase (%)
1.	SLTA	10	66.6 %
2.	Akademi/Perguruan Tinggi	5	33,4%
	Jumlah	15	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel 5.3 diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan informan untuk berpendidikan SLTA berjumlah10 orang (66,6%), untuk Akademi/Perguruan Tinggi berjumlah 5 orang (33,4%). Maka dapat diakumulasikan bahwa tingkat pendidikan SLTA lebih dominan.

5.2 Pembahasan Hasil Penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan indikator yang mempengaruhi terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan dimana peneliti menjadikan indikator ini sebagai kerangka pemikiran yang dijadikan acuan dalam penilaian atas Evaluasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dilihat dari hasil penelitian tiap-tiap indikator dibawah :

5.2.1 Indikator Pengetahuan Dan Keahlian

Berdasarkan wawancara dengan kepala desa jaya kopah,Erick Guspi yondra selaku Sekretaris Desa jaya kopah, Radius selaku BPD desa jaya kopah, Deka Yumadi selaku kepala Dusun murbai, Ali Wardana selaku kepala Dusun

linjuang, Masriadi selaku kepala Dusun Bukit Termenung dan Hayatun nopus selaku masyarakat. pengetahuan dan keahlian merupakan bagian yang sangat mendasar bagi kalangan masyarakat, terutama tentang pengetahuan pajak bumi dan bangunan. Dimana peranan pemerintah penting dalam memberikan wawasan serta sosialisasi tentang pentingnya manfaat pajak bumi dan bangunan bagi pembangunan. Bagaimana pengetahuan Bapak/ibu terhadap pentingnya pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa jaya kopah”?

sangat penting, karena digunakan untuk biaya belanja pegawai dan bangunan sarana dan prasarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit. dan sekolah lebih mudah terealisasi". (Jum'at, 17 Juli 2020)

Tentu saja pembayaran pajak sangat penting, karena sangat berguna untuk kepentingan umum. (sabtu, 18 juli 2020)

pembayaran pajak sangatlah penting. kalau tidak membayar tentu saja kepentingan umum seperti jalan, sekolah dan rumah sakit tidak akan terbangun dengan baik. (sabtu, 18 juli 2020)

Menurut saya, pembayaran pajak itu penting, karena kalau tidak ada pembayaran pajak yang lancar, maka tidak akan ada berdiri sekolah-sekolah, jembatan, jalan dan tempat-tempat umum. (Selasa, 14 Juli 2020)

Menurut saya sangat penting, karena digunakan untuk biaya dan pembangunan sarana dan prasarana umum seperti jalan, jembatan maka dari itu penting untuk membayar pajak jika ingin daerah kita maju. (Selasa, 14 Juli 2020)

Menurut saya sangat penting, karena jika kita tidak membayar pajak tidak mungkin kita bisa membangun di desa ini. (Selasa, 14 Juli 2020)

Pembayaran pajak bumi dan bangunan itu sangat penting. ((Selasa, 14 Juli 2020)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan sudah cukup baik karena, pemungutan pajak sudah dilaksanakan. Dan kepala desa memerintahkan kepada

RT/RW atau kepada petugas pemungutan pajak. Dan masyarakat pun ikut bertanggung jawab dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa jaya Kopah.

Berdasarkan observasi yang saya lakukan terhadap pengetahuan masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan sudah berjalan dengan baik. Karena kepala desa maupun masyarakat sangat mendukung sekali terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa jaya kopah tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pajak bumi dan bangunan yang dilakukan dikantor desa untuk meningkatkan pembangunan di desa jaya kopah yaitu Bagaimanakah keahlian petugas dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa jaya kopah. Berikut kutipan wawancara penulis dengan bapak Matnur selaku Kepala Desa jaya kopah, Bapak Erik Guspi Yondra selaku Sekretaris, bapak radius selaku BPD, bapak Desri Hensa selaku RT, Bapak Sosriadi selaku RT, Ibu Kurniati dan Ibu Sri Dempika selaku masyarakat.

Keahlian petugas tersebut tergantung ketegasan petugas pemungutan pajak meminta kepada masyarakat desa jaya kopah. (Jum'at, 17 juli 2020)

Sudah dilakukan dengan baik dan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan kita tinggal mengikuti apa yang dilakukan petugas tersebut itu semua sudah di lakukan dengan baik. (sabtu. 18 juli 2020).

petugas pajak sudah ahli dan sudah baik melakukan pemungutan pajak karena sudah tugas mereka melakukan pemungutan pajak tersebut. (sabtu 18 juli 2020)

Menurut saya, sangat baik dan bijaksana dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa jaya kopah. (Selasa, 14 Juli 2020)

Petugas pemungutan pajak sudah baik dan sudah ahli dalam pemungutan pajak karna sudah tugas mereka dalam pemungutan pajak(Selasa, 14 Juli 2020)

Menurut saya, keahlian petugas dalam pemungutan pajak tersebut sudah berjalan dengan baik". (Selasa, 14 Juli 2020)

Menurut saya,Petugas pemungutan pajak sudah baik dan sudah ahli. (Selasa, 14 Juli 2020)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa keahlian petugas dalam pemungutan pajak sudah cukup baik karena, pemungutan pajak sudah dilaksanakan. Dan kepala desa memerintahkan kepada RT/RW atau kepada petugas pemungutan pajak. Dan masyarakat pun ikut bertanggung jawab dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa jaya Kopah.

Berdasarkan observasi yang saya lakukan terhadap keahlian petugas dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sudah berjalan dengan baik.karena petugas sudah menjalankan kewajibannya sebagai petugas pemungutan pajak,dan sudah ahli di bidang pemungutan pajak. Karena kepala desa maupun masyarakat sangat mendukung sekali terhadap pembayaran pajak tersebut. Keahlian petugas dalam pemungutan pajak tersebut harus benar-benar teliti dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Selanjutnya pajak bumi dan bangunan,pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaatnya dari suatu tanah dan bangunan tersebut,yaitu Bagaimanakah pengetahuan dan kewenangan masyarakat desa jaya kopah dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan.berikut kutipan wawancara penulis dengan Kepala Desa Bapak Matnur,

Bapak Erik Guspi Yondra Selaku Sekretaris, Bapak Radius Selaku BPD, Bapak Ali Wardana selaku kepala Dusun linjuang, Bapak Deka Yumadi selaku kepala dusun murbai, Bapak Masriadi Selaku Kepala Dusun Bukit Termenung, dan Ibu Irma Yanti Selaku Masyarakat.

Menurut saya,masyarakat desa jaya kopah sangat pro aktif dalam menjalankan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan bangunan,dan sekaligus menjelaskan fungsi dan manfaat pajak bumi dan bangunan tersebut pada desa dan masyarakat.(Jum'at, 17 juli 2020)

Sudah diikuti tapi terkadang ada yang melenceng karena tidak kesengajaan dan kekeliruan yang terjadi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan ,tetapi setelah itu diperbaiki lagi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.(sabtu,18 juli 2020)

Kewenangan desa jaya kopah sudah pro aktif dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan,dan sudah berjalan dengan lancer.(sabtu,18 juli 2020)

Menurut saya sudah aktif dalam menjalankan pemungutan pajak bumi dan bangunan,dan menjalankan fungsi dan manfaatnya pajak bumi dan bangunan pada desa dan masyarakat (Selasa, 14 Juli 2020)

Menurut saya,kewenangan masyarakat di desa jaya kopah sudah sangat aktif dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.(Selasa, 14 Juli 2020)

Menurut saya,pengetahuan dan kewenangan masyarakat desa jaya kopah sudah sangat baik dan sudah menjalankan sesuai dengan aturan yang telah di buat oleh perangkat desa tersebut (Selasa, 14 Juli 2020)

Menurut saya,kalau pengetahuannya dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sudah baik dan sudah berjalan dengan lancer (Selasa, 14 Juli 2020)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan kewenangan masyarakat terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan sudah cukup baik karena, pemungutan pajak sudah dilaksanakan. Dan kepala desa memerintahkan kepada RT/RW atau kepada petugas pemungutan pajak. Dan masyarakat pun ikut bertanggung jawab dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa jaya Kopah.

Berdasarkan observasi yang saya lakukan dilapangan terhadap pengetahuan dan kewenangan masyarakat dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sudah berjalan dengan baik. Karena kepala desa maupun masyarakat sangat mendukung sekali terhadap pembayaran pajak tersebut.

Berkaitan dengan indikator pengetahuan dan keahlian jawaban yang diberikan informan kebanyakan hampir sama yang bermakna pada satu kesimpulan saja, pada pertanyaan pertama tentang bagaimana pengetahuan terhadap pentingnya pembayaran pajak bumi dan bangunan, sebagai orang yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak atas objek pajak yang mereka miliki atau memanfaatkan. wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah, jadi sebagai warga Negara yang merupakan bagian dari sebuah daerah yang membayar pajak juga dapat di artikan kesadaran untuk turut serta dalam pembangunan jadi pembayaran pajak bumi dan bangunan. pada jawaban dari pertanyaan yang kedua yaitu tentang bagaimanakah keahlian petugas dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan, yaitu memberikan pekerjaan kepada petugas pajak yang sudah ahli dalam pemungutan pajak agar pemunguttan pajak tersebut tidak ada kekeliruan. pada jawaban dari pertanyaan yang ketiga tentang bagaimanakah pengetahuan dan kewemnangan masyarakat dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan, pengetahuan dan kewenangan masyarakat desa jaya kopah sangat pro aktif dalam menjalankan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan bangunan dan sekaligus menjelaskan fungsi dan manfaat pajak bumi dan bangunan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara,observasi dan dokumentasi yang saya lakukan.Dari hasil wawancara yang saya lakukan terhadap pentingnya pembayaran pajak bumi dan bangunan memang cukup baik ,hal ini dikarenakan pemerintah desa sudah bisa mensosialisasikan manfaat pajak bumi dan bangunan bagi pembangunan,walaupun belum maksimal dan masih ada yang kurang baik tanggapan dari masyarakat. Dan dapat di disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan sudah cukup baik karena, pemungutan pajak sudah dilaksanakan. Dan kepala desa memerintahkan kepada RT/RW atau kepada petugas pemungutan pajak. Dan masyarakat pun ikut bertanggung jawab dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa jaya Kopah.selanjutnya hasil observasi yang saya lakukan terhadap pengetahuan masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan sudah berjalan dengan baik. Karena kepala desa maupun masyarakat sangat mendukung sekali terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa jaya kopah tersebut.

Selanjutnya mengenai keahlian petugas dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan,dari hasil wawancara yang saya lakukan bahwa keahlian petugas dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan untuk pembangunan sudah cukup baik,terlihat dalam tingkat keahlian petugas untuk pemahaman manfaat pajak untuk pembangunan sudah bisa dirasakan hal ini dilihat dari infrastruktur desa dan bangunan-bangunan umum didesa yang sudah bisa dinikmati hasilnya seperti jalan-jalan desa yang sudah tersemenisasi,balai desa yang baru dan lain-lainnya.selanjutnya hasil observasi yang saya lakukan terhadap keahlian petugas dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sudah berjalan dengan baik.karena

petugas sudah menjalankan kewajibannya sebagai petugas pemungutan pajak, dan sudah ahli di bidang pemungutan pajak. Karena kepala desa maupun masyarakat sangat mendukung sekali terhadap pembayaran pajak tersebut. Keahlian petugas dalam pemungutan pajak tersebut harus benar-benar teliti dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan pengetahuan dan keahlian masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk pembangunan desa dengan mewawancarai masyarakat dan perangkat desa berada pada item penelitian cukup baik, yang mana pengetahuan dan keahlian masyarakat desa Jaya Kopah mengenai manfaat dan pentingnya pajak bumi dan bangunan sudah bisa dirasakan oleh masyarakat desa Jaya, hal ini dikarenakan pemerintah desa yang selalu andil dalam upaya memberikan pengetahuan dan pengarahan tentang manfaat pajak bumi dan bangunan untuk pembangunan desa, walaupun belum begitu maksimal pemerintah desa dalam memberikan wawasan dan sosialisasi, ini semua semata-mata bentuk tujuan dari pemerintahan desa dalam menyalurkan atau memberikan manfaat dari segi pembangunan, walaupun pembangunan desa yang sifatnya masih bertahap.

5.2.2 Indikator Pekerjaan Masyarakat

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan bahwa pekerjaan masyarakat tergantung pada pertanian, pedagang sehingga penduduk mengusahakan pertanian yang mereka miliki, adapun pertanyaan Apa saja pekerjaan masyarakat di desa Jaya Kopah. Kutipan wawancara penulis dengan Bapak Matnur selaku Kepala Desa Jaya Kopah, Bapak Erick Guspi Yondra selaku

Sekretaris, Bapak Radius Selaku BPD, Bapak Desri Hensa Selaku RT dusun murbai, Bapak Sosriadi Selaku RW, Bapak Gunawan Selaku RT dan Bapak Syafrizal selaku masyarakat

pekerjaan masyarakat di desa jaya kopah itu adalah petani.wirasuata dan pedagang (Jum'at, 17 juli 2020)

Menurut saya,pekerjaan masyarakat desa jaya kopah petani dan pedagang (Selasa, 14 Juli 2020).

Menurut saya,masyarakat desa jaya kopah bekerja sebagai petani dan berdagang (Jum'at, 17 juli 2020).

Menurut saya sebagai RT pekerjaan masyarakat desa jaya itu banyak yang petani (Selasa, 14 Juli 2020).

pekerjaan masyarakat desa jaya kopah rata-rata petani (Selasa, 14 Juli 2020).

petani dan pedagang (Selasa, 14 Juli 2020).

petani,pedagang dan wirasuata (Selasa, 14 Juli 2020).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan masyarakat desa jaya kopah hampir sama yaitu sebagai petani,wirasuasta dan pedagang.

Berdasarkan observasi yang saya lakukan dilapangan terhadap pekerjaan masyarakat desa jaya kopah sangat bergantung ke pertanian,wirasuasta dan pedagang sudah menjadi pekerjaan sehari-hari bagi masyarakat desa jaya kopah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Selanjutnya pendapatan atau penghasilan masyarakat dilihat dari ekonomi masyarakat,hal ini dikarenakan ekonomi menjadi salah satu tolak ikur dari perkembangan masyarakat tersebut,yaitu pertanyaan Apakah pendapatan/penghasilan masyarakat desa jaya kopah sudah terpenuhi.berikut

kutipan dari Bapak Matnur Selaku Kepala Desa Jaya Kopah, Bapak Erick Guspi Yondra Selaku Sekretaris, Bapak Radius selaku BPD, Ibu Kurniati selaku masyarakat, Ibu Yuli Aisyah Selaku Masyarakat dan Ibu Delmawati Selaku Masyarakat

Menurut saya sebagai kepala desa jaya kopah penghasilan masyarakat tersebut masih belum terpenuhi masih banyak kekurangan. (Jum'at, 17 juli 2020)

Terkait pendapatan/penghasilan masyarakat desa jaya kopah belum terpenuhi". (Selasa, 14 Juli 2020).

Menurut dalam segi pekerjaan dan kebutuhan pangan belum terpenuhi. (Jum'at, 17 juli 2020).

pendapatan atau penghasilan di desa jaya kopah belum terpenuhi, karena faktor ekonomi masyarakat. (Selasa, 14 Juli 2020).

Menurut saya penghasilan masyarakat desa jaya kopah masih sangat belum terpenuhi, karena faktor ekonomi yang masyarakat yang tidak memadai (Jum'at, 17 juli 2020).

Terkait dengan penghasilan masyarakat desa jaya kopah masih belum terpenuhi, karena faktor ekonomi masyarakat (Jum'at, 17 juli 2020).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan/penghasilan masyarakat desa jaya kopah belum terpenuhi karena, faktor ekonomi masyarakatnya belum memadai. Dan masyarakat pun kesusahan dalam mencari pekerjaan di desa jaya Kopah.

Berdasarkan observasi yang saya lakukan terhadap pendapatan atau penghasilan masyarakat di desa jaya kopah belum berjalan dengan baik atau belum terpenuhi dengan baik. Karena kepala desa maupun masyarakat masih terkendala dalam faktor ekonomi.

Selanjutnya pajak bumi dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan kedudukan ekonomi bagi seseorang atas badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperolehnya yaitu pertanyaan Apakah dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dilihat dari pendapatan masyarakat. kutipan wawancara penulis dengan bapak Matnur selaku Kepala Desa Jaya Kopah, Bapak Erick Guspi Yondra selaku Sekretaris, Bapak Radius selaku BPD, Bapak Ali Wardana selaku kepala dusun linjuang, Bapak Deka Yumadi selaku kepala dusun murbai, Bapak Masriadi selaku kepala dusun bukit termenung, dan Ibu Hayatun Nupus selaku masyarakat

Pendapatan masyarakatnya, tetapi tergantung oleh orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat hak atas tanah dan bangunannya. (Jum'at, 17 Juli 2020)

Menurut saya, terkait dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, tidak dilihat dari pendapatan, tetapi dilihat dari luas tanah tersebut. (Selasa, 14 Juli 2020).

Menurut saya, tidak dilihat dari pendapatan masyarakat, tetapi dilihat dari luas tanah yang dimiliki masyarakat (Jum'at, 17 Juli 2020).

Tidak dilihat dari pendapatan masyarakat, tetapi dilihat dari luas tanah masyarakat tersebut. (Selasa, 14 Juli 2020).

Menurut saya, tidak dilihat dari pendapatan, tetapi dilihat dari luas tanah wajib pajak (Selasa, 14 Juli 2020)

Menurut saya, tidak dilihat dari pendapatan, tetapi dilihat dari luas tanah (Selasa, 14 Juli 2020).

Tidak tergantung pendapatan, tetapi tergantung lebar atau luas tanah wajib pajak (Selasa, 14 Juli 2020)

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan tidak dilihat dari pendapatan masyarakat, tetapi dilihat dari lebar

atau luas tanah wajib pajak tersebut. Dan masyarakat pun ikut bertanggung jawab dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa jaya Kopah.

Berdasarkan observasi yang saya lakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa jaya kopah tidak dilihat dari pendapatan masyarakat. Tetapi dilihat dari luas tanah yang ditempati oleh masyarakat atau lebar tanah pribadi masyarakat atau badan yang memperoleh manfaat hak atas tanah dan bangunan tersebut. kepala desa maupun masyarakat sangat mendukung sekali terhadap pembayaran pajak tersebut.

Berkaitan dengan indikator pekerjaan masyarakat jawaban yang diberikan informan kebanyakan hampir sama yang bermakna pada satu kesimpulan saja, pada pertanyaan pertama tentang apa saja pekerjaan masyarakat desa jaya kopah, pada umumnya masyarakat desa jaya sangat tergantung pada pertanian, wiraswasta dan pedagang, sehingga penduduk desa jaya dapat mengusahakan pertanian yang mereka miliki, usaha pertanian yang dimaksud untuk membantu penduduk desa jaya dalam memenuhi ekonomi keluarga mereka sehari-hari. usaha pertanian di desa jaya kopah seperti kebun karet dan kebun sawit. pada jawaban dari pertanyaan yang kedua yaitu apakah pendapatan atau penghasilan masyarakat desa jaya kopah sudah terpenuhi, Pendapatan/penghasilan masyarakat dilihat dari ekonomi masyarakat, hal ini dikarenakan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur dari perkembangan masyarakat tersebut apakah sudah terpenuhi atau belumnya, pendapatan/penghasilan masyarakat desa jaya kopah tentu saja belum terpenuhi karena masih banyak nya kekurangan faktor ekonomi. pada jawaban dari pertanyaan yang ketiga yaitu apakah dalam

pembayaran pajak bumi dan bangunan dilihat dari pendapatan masyarakat, pajak bumi dan bangunan, pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaatnya dari suatu tanah dan bangunan tersebut, maka pemungutan pajak bumi dan bangunan tersebut tidak dilihat dari pendapatan masyarakatnya, tapi dilihat dari luas tanah dan lebar tanah yang ditempati orang pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang saya lakukan, Dari hasil wawancara pekerjaan masyarakat di desa Jaya Kopah, pekerjaan masyarakat merupakan faktor yang dapat dilihat dari bentuk partisipasi masyarakat terhadap pajak bumi dan bangunan. Secara umum pekerjaan masyarakat desa Jaya Kopah sebagai petani untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan yang disalurkan untuk pemerataan pajak bumi dan bangunan pemerintah. Selanjutnya hasil observasi yang saya lakukan terhadap pendapatan atau penghasilan masyarakat di desa Jaya Kopah belum berjalan dengan baik atau belum terpenuhi dengan baik. Karena kepala desa maupun masyarakat masih terkendala dalam faktor ekonomi.

Selanjutnya wawancara tentang pendapatan/penghasilan masyarakat desa Jaya Kopah saat ini, untuk meningkatkan pembayaran pajak bumi dan bangunan kurang baik, terlihat dengan tarap hidup dan kebutuhan sehari-hari masih belum terpenuhi, hal ini akibat ekonomi masyarakat yang belum stabil baik dari segi pertanian, usaha-usaha masyarakat dan lain-lainnya. Selanjutnya hasil observasi yang saya lakukan di lapangan terhadap pekerjaan masyarakat desa Jaya Kopah

sangat bergantung ke pertanian, wiraswasta dan pedagang sudah menjadi pekerjaan sehari-hari bagi masyarakat desa jaya kopah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Berikutnya yang mana pekerjaan atau pendapatan masyarakat desa jaya kopah masih belum terpenuhi, dimana dari segi pekerjaan dan pendapatan masyarakat masih kurang baik di desa jaya kopah

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi

5.2.3 Indikator Pendidikan Dan Buta Huruf

Berdasarkan wawancara penulis dengan tingkat pendidikan dan buta huruf merupakan suatu dasar yang sangat melekat dikalangan masyarakat, dimana dengan seirannya perkembangan teknologi pendidikan yang mengalami perubahan sangat pesat untuk menuntut masyarakat untuk berlomba-lomba kearah yang lebih baik untuk pendidikan dan meninggalkan yang namanya buta huruf. maka dari sisi pendidikan yang lebih baik masyarakat dituntut akan pentingnya dan manfaat pajak bumi dan bangunan. Adaun pertanyaannya Bagaimana tingkat pendidikan didesa jaya kopah, berikut kutipan dari Bapak Matnur Selaku Kepala Desa Jaya Kopah, Bapak Erick Guspi Yondra Selaku Sekretaris, Bapak Radius Selaku BPD, Bapak Deka Yumadi Selaku Kepala Dusun Murbai, Bapak Ali Wardana Selaku Kepala Dusun Linjuang, Bapak Masriadi Selaku Kepala Dusun Bukit Termenung Dan Ibu Resmawati Selaku Masyarakat.

Tingkat pendidikan di desa jaya kopah masih standar, masih banyak yang tamatan SLTA. (Jum'at, 17 juli 2020)

Tingkat pendidikan di desa jaya kopah masih standar. (sabtu, 18 juli 2020).

Terkait dengan tingkat pendidikan di desa jaya kopah, menurut saya tingkat pendidikan di desa jaya kopah masih standar hanya bisa sampai ke jenjang pendidikan SLTA, di karenakan faktor ekonomi masyarakat (sabtu, 18 juli 2020).

Menurut saya tingkat pendidikan di desa jaya kopah masih standar. (Selasa, 14 Juli 2020).

Tingkat pendidikan di desa jaya kopah masih standar, karna hanya mampu menyelesaikan tingkat pendidikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar 9 Tahun (SD, dan SMP, SLTA) di karenakan dalam kesediaan SDM yang memadai. (Selasa, 14 Juli 2020).

Menurut saya tingkat pendidikan di desa jaya kopah masih standar. (Selasa, 14 Juli 2020).

Menurut saya masih standar, karena di desa jaya kopah masih banyak yang tamatan SLTA di karenakan faktor ekonomi. (Selasa, 14 Juli 2020).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan buta huruf di jaya kopah masih standar karna hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar 9 tahun (SD, SMP dan SLTA) di karenakan faktor ekonomi masyarakat desa jaya Kopah.

Berdasarkan observasi yang saya lakukan terhadap pendidikan dan buta huruf di jaya kopah masih standar. Karena kepala desa maupun masyarakat sangat menyesalkan karena pendidikan yang ada masih standar di desa jaya kopah.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana cara masyarakat mengurangi angka buta huruf di desa jaya kopah yaitu dengan pertanyaan Bagaimana cara masyarakat desa jaya kopah untuk mengurangi angka buta huruf, berikut kutipan wawancara penulis dengan bapak Matnur selaku Kepala Desa jaya kopah, Bapak Erick Guspi Yondra selaku Sekretaris, Bapak Radius selaku BPD, Bapak Desri

Hensa selaku RT dusun murbai, Bapak Sosriadi selaku RT linjuang, Bapak Gunawan selaku RT bukit termenung dan Ibu Irma Yanti selaku masyarakat:

Menurut saya, dengan cara membukak sekolah gratis atau sekolah paket seperti paket C di desa jaya kopah. (Jum'at, 17 juli 2020)

Menurut saya, dengan menyekolahkan anak-anaknya agar tidak terjadi angka buta huruf di masa yang akan datang. (sabtu, 18 juli 2020).

Menurut saya, dengan cara membukak sekolah paket bagi masyarakat yang tidak mampu agar tidak terjadi angka buta huruf di desa jaya kopah di masa yang akan datang. (sabtu, 18 juli 2020).

Dengan cara mendirikan sekolah paket dan sekolah gratis di desa jaya kopah. (Selasa, 14 Juli 2020).

Terkait dengan pendidikan dan buta huruf maka masyarakat menguranginya dengan cara meningkatkan pendidikan di desa jaya kopah. (Selasa, 14 Juli 2020).

Dengan mengadakan studi belajar seperti memberikan beasiswa kepada orang-orang yang tidak mampu bersekolah agar tidak terjadi angka buta huruf di masa depan. (Selasa, 14 Juli 2020).

Yaitu dengan mendirikan sekolah paket bagi yang tidak mampu bersekolah. (sabtu, 18 juli 2020).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Untuk Mengurangi Angka Buta Huruf Di Desa Jaya Kopah dengan cara membukak sekolah paket bagi masyarakat yang tidak mampu agar tidak terjadi angka buta huruf di desa jaya kopah di masa yang akan datang.

Berdasarkan observasi yang saya lakukan Untuk Mengurangi Angka Buta Huruf Di Desa Jaya Kopah dengan cara membukak sekolah paket bagi masyarakat yang tidak mampu agar tidak terjadi angka buta huruf di desa jaya kopah di masa yang akan datang.. Karena kepala desa maupun masyarakat sangat memintak agar di dirikan sekolah paket dan sekolah gratis seperti diberikan beasiswa.

Selanjutnya tingkat pengangguran di desa jaya kopah masih banyak karena disebabkan karena terbatasnya pekerjaan dan sedikitnya lowongan pekerjaan bagi yang tamatan sarjana dan SLTA. Pertanyaannya yaitu Apakah tingkat pengangguran masih banyak di desa jaya kopah. berikut kutipan wawancara penulis dengan bapak Matnur selaku Kepala Desa Jaya Kopah, Bapak Erick Guspi Yondra selaku Sekretaris, Bapak Radius selaku BPD, Ibu Resma Wati selaku masyarakat, Ibu Irma Yanti selaku masyarakat, Ibu Kurniati selaku masyarakat DAN Bapak Syafrizal selaku masyarakat:

Ia, tingkat pengangguran masih banyak di desa jaya kopah. (Jum'at, 17 juli 2020)

Menurut saya, ia, tingkat pengangguran di desa jaya kopah masih banyak, karena kurangnya lowongan pekerjaan. (sabtu, 18 juli 2020).

Menurut saya, ia, masih banyak tingkat pengangguran, di karenakan kurangnya lowongan pekerjaan yang tersedia. (sabtu, 18 juli 2020)

Ia, masih banyak tingkat pengangguran di desa jaya kopah, sedangkan yang tamatan sarjana banyak. (Selasa, 14 Juli 2020)''

Masih banyak, karena kurangnya lowongan pekerjaan bagi sarjana. (Jum'at, 17 juli 2020)

Masih banyak, seperti masyarakat yang pendidikannya rendah susah untuk mencari pekerjaan, karena itu terjadinya tingkat pengangguran yang banyak. (Selasa, 14 Juli 2020)

Ia masih banyak, karena kurangnya lowongan pekerjaan. (sabtu, 18 juli 2020).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran Di Desa Jaya Kopah masih banyak karna kurangnya lowongan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat dan masyarakat yang pendidikannya rendah susah untuk mencari pekerjaan, karena itu terjadinya tingkat pengangguran di desa jaya kopah .

Berdasarkan observasi yang saya lakukan Untuk tingkat pengangguran Di Desa Jaya Kopah dengan cara membukak lowongan pekerjaan yang banyak bagi yang tamatan sarjana,SLTA dan masyarakat yang masih pengangguran di desa jaya kopah agar tidak terjadi tingkat pengangguran yang banyak.

Berkaitan dengan indikator pendidikan dan buta huruf yang diberikan informan kebanyakan hampir sama yang bermakna pada satu kesimpulan saja,pada pertanyaan pertama tentang bagaimana tingkat pendidikan di desa jaya kopah,pada dasarnya tingkat pendidikan di desa jaya k pah masih standara, masih banyak yang tamatan SLTA,dikarenakan kurangnya faktor ekonomi masyarakat desa jaya..pada jawaban dari pertanyaan yang kedua yaitu bagaimanakah cara masyarakat desa jaya kopah untuk mengurangi angka buta huruf,yaitu dengan cara menyekolahkan anak mereka samapai kejenjang pendidikan yang tinggi,agar tidak terjadi angka buta huruf di masa yang akan datang. pada jawaban dari pertanyaan yang ketiga yaitu apakah tingkat pengangguran masih banyak di desa jaya kopah.ia tingkat pengangguran masih banyak di desa jaya kopah,dikarenakan kurangnya lowongan pekerjaan bagi yang tamatan sarjana dan SLTA.

Berdasarkan hasil wawancara,observasi dan dokumentasi yang saya lakukan tentang bagaimana tingkat pendidikan di desa jaya kopah,tingkat pendidikan masyarakat desa jaya kopah terhadap kesadaran pembayaran pajak bumi dan bangunan sudah bisa dirasakan dan dipahami manfaatnya,hal ini karena pendidikan masyarakat desa jaya kopah sudah standar.dimana keberhasilan suatu desa atau wilayah akan maju karena status pendidikan lebih baik.selanjutnya berdasarkan observasi yang saya lakukan terhadap pendidikan dan buta huruf

dijaya kopah masih standar. Karena kepala desa maupun masyarakat sangat menyesalkan karena pendidikan yang ada masih standar di desa jaya kopah.

Dari hasil wawancara yang saya lakukan tentang bagaimana cara masyarakat desa jaya kopah untuk mengurangi angka buta huruf Untuk Mengurangi Angka Buta Huruf Di Desa Jaya Kopah dengan cara membukak sekolah paket bagi masyarakat yang tidak mampu agar tidak terjadi angka buta huruf di desa jaya kopah di masa yang akan datang.. Karena kepala desa maupun masyarakat sangat memintak agar di dirikan sekolah paket dan sekolah gratis seperti diberikan beasiswa.berdasarkan observasi yang saya lakukan sebetulnya kualitas sumber daya manusia di desa jaya kopah sudah baik,hal ini dikarenakan tingkat kesadaran dalam pembayaran pajak bumi dan banguna sudah mulai membaik,walaupun masih ada satu atau dua warga yang merasa buta huruf tetapi tidak menutup kemungkinan pemerintahan desa jaya kopah selalu memberikan wawasan dan pengertian demi kelancaran pembayaran pajak bumi dan banguna yang lebih baik lagi.

Berdasarkan tingkat pendidikan dan buta huruf masyarakat desa jaya kopah terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan sudah bisa dirasakan dan sudah dipahami manfaatnya,hal ini tidak lepas dari kualitas sumber daya manusia yang ada di desa jaya kopah,terbukti dengan tingkat kesadaran dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang sudah membaik,walaupun masih ada satu atau dua warga yang merasa masih buta huruf dalam memahami manfaatnya pajak bumi dan bangunan.akan tetapi pemerintahan desa jaya kopah selalu memberikan wawasan dan pengertian demi kelancaran pembayaran pajak bumi dan bangunan.

5.2.4 Indikator Jenis Kelamin

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan bahwa jenis kelamin Sudah diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menggagap faktor inilah dapat yang mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap sesuatu pokok permasalahan, jadi keterkaitan antara jenis kelamin dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan yaitu banyaknya laki-laki yang mayoritasnya wajib pajak didesa jaya kopah dalam SPT (surat pemberitahuan tahunan) pajak bumi dan bangunan adalah laki-laki yang menjadi kepala keluarga. begitu juga dengan pajak. Adapun pertanyaannya Apakah laki-laki desa jaya kopah ikut serta dalam musyawara pajak bumi dan bangunan, berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Matnur Selaku Kepala Desa Jaya Kopah, Bapak Erick Guspi Yondra Selaku Sekretaris, Bapak Radius Selaku BPD, Bapak Desri Hensa Selaku RT Dusun Murbai, Bapak Sosriadi Selaku RT Dusun Linjuan, Bapak Gunawan Selaku RT dusun bukit termenung dan Ibu Irma Yanti Selaku Masyarakat

Tidak ikut serta, hanya perangkat desa saja yang bermusyawara dalam pajak bumi dan bangunan. (Jum'at, 17 juli 2020)

Menurut saya, tidak ikut serta dalam musyawara pajak bumi dan bngunan, hanya perangkat desa saja yang melakukan musyawara pajak bumi dan bangunan". (sabtu, 18 juli 2020).

Menurut saya, tidak ikut serta, hanya perangkat desa saja yang bermusyawara. (sabtu, 18 juli 2020).

Tidak ikut serta, hanya perangkat desa saja yang melakukan musyawara. (Selasa, 14 Juli 2020).

Dalam permusyawara pajak bumi dan bangunan desa jaya kopah laki-laki tidak ikut serta,hanya perangkat desa saja yang ikut serta dalam permusyawaraan pajak bumi dan bangunan. (Selasa, 14 Juli 2020).

Menurut saya,tidak ikut serta,hanya perangkat desa saja yang melakukan musyawara pajak bumi dan bangunan .(Selasa, 14 Juli 2020).

Masyarakat desa jaya kopah tidak ikut serta,hanya perangkat desa saja yang .(sabtu,18 juli 2020).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa laki-laki desa jaya kopah ikut serta dalam musyawara pajak bumi dan bangunan,laki-laki desa jaya kopah tidak ikut serta dalam musyawara pajak bumi dan bangunan,hanya perangkat desa jaya kopah saja yang melakukan musyawara pajak bumi dan bangunan

Berdasarkan observasi yang saya lakukan terhadap ke ikut sertaan laki-laki desa jaya kopah dalam musyawara pajak bumi dan bangunan.laki-lakinya tidak ikut serta hanya perangkat desa saja yang melakukan musyawara.

Selanjutnya perempuan desa jaya kopah hanya berpartisipasi dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan saja.pertanyaannya yaitu Bagaimana peranan perempuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan berikut kutipan wawancara dengan Bapak Matnur selaku Kepala Desa jaya kopah, ,Bapak Erick Guspi Yondra Selaku Sekretaris, Bapak Radius Selaku BPD, Bapak Deka Yumadi Selaku Kepala Dusun Murbai, Bapak Ali Wardana Selaku Kepala Dusun Linjuang, Bapak Masriadi Selaku Kepala Dusun Bukit Termenung dan Ibu Resmawati Selaku Masyarakat:

Menurut saya,partisipasi perempuan dalam membayar pajak bumi dan bangunan,hanya ikut serta dalam pembayaran.(Jum'at, 17 juli 2020)

Menurut saya,peranan perempuan dalam meningkatkan partisipasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan hanya ikut serta dalam pembayaran saja.(sabtu,18 juli 2020).

Terkait dengan peranan perempuan dalam partisipasi pembayaran pajak yaitu dengan cara membayar pajak ke petugas pemungutan pajak.(sabtu,18 juli 2020).

Menurut saya,partisipasi perempuan dalam membayar pajak bumi dan bangunan yaitu dengan cara ikut serta dalam pembayarannya.(Selasa, 14 Juli 2020).

Ikut serta,yaitu dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa jaya kopah.(Selasa, 14 Juli 2020).

Menurut saya,partisipasi perempuan dalam membayar pajak bumi dan bangunan hanya ikut serta dalam pembayaran.(Selasa, 14 Juli 2020).

Menurut saya,partisipasi perempuan hanya dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan apabila petugas pajak memungut kerumah.(Selasa, 14 Juli 2020).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan perempuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan,partisipasi perempuan hanya dalam pembayaran apabila petugas pemungutan pajak datang kerumah untuk pemintak.

Berdasarkan observasi yang saya lakukan dalam peranan perempuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan,ikut serta nya hanya dalam pembayaran saja apabila petugas pajak datang kerumah,hanya itu partisipasi perempuan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Selanjutnya untuk mengetahui berapa jumlah jenis kelamin laki-laki di desa jaya kopah.berikut kutipan wawancara dengan Bapak Matnur selaku Kepala Desa jaya kopah, ,Bapak Erick Guspi Yondra Selaku Sekretaris, Bapak Radius

Selaku BPD, Bapak Deka Yumadi Selaku Kepala Dusun Murbai, Bapak Ali Wardana Selaku Kepala Dusun Linjuang, Bapak Masriadi Selaku Kepala Dusun Bukit Termenung dan Ibu Resmawati Selaku Masyarakat:

Jumlah jenis kelamin laki-laki di desa jaya kopah 763.(Jum'at, 17 juli 2020)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah jenis kelamin laki-laki di desa jaya kopah berjumlah 763 sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 804.

Berdasarkan observasi yang saya lakukan dilapangan jumlah jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki di desa jaya kopah.

Berkaitan dengan indikator jenis kelamin yang diberikan informan kebanyakan hampir sama yang bermakna pada satu kesimpulan saja,pada pertanyaan pertama tentang apakah laki-laki desa jaya ikut serta dalam musyawara pajak bumi dan bangunan.masyarakat laki-laki desa jaya kopah tidak ikut serta dalam musyawara pajak bumi dan bangunan,hanya perangkat desa saja yang bermusyawara.pada jawaban dari pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana peranan perempuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.peranan perempuan dalam membayar pajak bumi dan bangunan hanya dalam melakukan pembayaran saja,apabila petugas pemungutan pajak datang kerumah memintak. pada jawaban dari pertanyaan yang ketiga yaitu berapa jumlah jenis kelamin laki-laki di desa jaya kopah. jumlah jenis kelamin

laki-laki di desa jaya kopah berjumlah 763 sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 804.

Berdasarkan hasil wawancara,observasi dan dokumentasi yang saya lakukan tentang apakah laki-laki desa jaya kopah ikut serta dalam musyawara pajak bumi dan bangunan,laki-laki desa jaya kopah tidak ikut serta dalam musyawara pajak bumi dan bangunan,yang ikut serta dalam musyawara pajak bumi dan bangunan hanya perangkat desa saja.selanjutnya observasi yang saya lakukan terhadap ke ikut sertaan laki-laki desa jaya kopah dalam musyawara pajak bumi dan bangunan.laki-lakinya tidak ikut serta hanya perangkat desa saja yang melakukan musyawara

Selanjutnya wawancara tentang peranan perempuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan,partisipasi perempuan hanya dalam pembayaran apabila petugas pemungutan pajak datang kerumah untuk pemintak.Berdasarkan observasi yang saya lakukan dalam peranan perempuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan,ikut serta nya hanya dalam pembayaran saja apabila petugas pajak datang kerumah,hanya itu partisipasi perempuan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan keikutsertan laki-laki desa jaya kopah dalam musyawara pajak bumi dan bangunan hanya perangkat desa saja,yang mana kesadaran untuk membayar pajak bagi wajib pajak yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan hanya mengikuti aturan,apabila petugas pajak memintak kerumah dia akan membayar pajak tersebut.

5.2.5 Indikator Kepercayaan Terhadap Budaya Tertentu

berdasarkan wawancara penulis dengan informan bahwa budaya akan sadar masyarakat akan pentingnya membayar pajak sudah tinggi maka budaya ini akan ada terus untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat lainnya, mengenai pentingnya pajak ini. pertanyaannya yaitu Bagaimanakah kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak dan fungsinya di desa jaya kopah. berikut kutipan wawancara penulis dengan bapak Matnur selaku Kepala Desa jaya kopah, Bapak Erick Guspi Yondra selaku Sekretaris, Bapak Radius selaku BPD, bapak Desri Hensa selaku RT Dusun Murbai, Bapak Sosriadi selaku RT Dusun Linjuang, Bapak Gunawan selaku RT Bukit Termenung DAN Ibu Irma Yanti selaku Masyarakat:

Sebenarnya kepercayaan itu sudah ada, tapi belum terlihat di desa jaya, karena masih ada yang lebih tinggi dari masyarakat (perangkat desa). (Jum'at, 17 juli 2020)

Menurut saya, masyarakat sudah percaya terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa jaya kopah yang dipungut oleh petugas pajak. (sabtu, 18 juli 2020).

Kepercayaan masyarakat atau kesadaran masyarakat sudah mencapai tingkat sebagaimana pada umumnya yang diharapkan pemerintah desa kepada masyarakat. (sabtu, 18 juli 2020).

Kepercayaannya sudah baik, bijak sana masyarakat, dan sudah mulai mengerti akan fungsi pajak bumi dan bangunan. (Selasa, 14 Juli 2020).

Terkait dengan kepercayaan masyarakat, masyarakatnya sudah percaya dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan. (Selasa, 14 Juli 2020).

Sudah percaya, karena pemungutan pajak sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya. (Selasa, 14 Juli 2020).

Menurut saya, sudah percaya, karena petugas pemungutan pajak sudah menjalankan sesuai dengan peraturan yang telah ada. (sabtu, 18 juli 2020).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan pajak dan fungsinya didesa jaya kopah,masyarakatnya sudah percaya,sudah bijak sana masyarakatnya dan sudah mulai mengerti akan fungsi pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan observasi yang saya lakukan dilapangan terhadap kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan pajak dan fungsinya sudah cukup baik dan terlaksana di desa jaya kopah.

Selanjutnya Pembayar pajak datang dari dalam diri pribadi wajib pajak bahwa tanpa di ingatkan,ada atau tidaknya sanksi wajib pajak tetap memenuhi kewajibannya untuk membayar yaitu Pertanyaanya Bagaimana cara menanamkan perilaku budaya sadar pajak yang tepat dilingkungan masyarakat desa jaya kopah,Berikut Kutipan Wawancara Penulis Dengan bapak Matnur selaku Kepala Desa jaya Kopah, Bapak Erick Guspi Yondra Sekretaris, Bapak Radius selaku BPD, Bapak Deka Yumadi selaku kepala Dusun Murbai, Bapak Ali Wardana selaku kepala Dusun Linjuang, Bapak Masriadi selaku kepala Dusun bukit Termenung dan Ibu Hayatun Nupus Selaku Masyarakat:

Dengan cara melalui pendidikan agar terbentuk karakter generasi bangsa yang cinta tanah air melalui kesadaran melaksanakan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan jadilah masyarakat yang taat membayar pajak.(Jum'at, 17 Juli 2020).

Dengan meningkatkan pendidikan,dan dengan cara pemungutan pajak kerumah-rumah.(sabtu,18 juli 2020)

Menurut saya,Dengan memungut kerumah-rumah,kalau tidak membayar akan dikenakan sanksi.(sabtu,18 juli 2020)

Menurut saya, dengan cara memintak kerumah, kalau tidak membayar akan dikenakan sanksi bagi masyarakat yang tidak membayar. (Selasa, 14 Juli 2020)

Menurut saya, timbulnya kesadaran masyarakat dengan tersendirinya, apabila petugas pemungutan pajak datang kerumah. (Selasa, 14 Juli 2020)

*Menurut saya, Dengan dipungutnya kerumah masyarakat akan sadar sendirinya terhadap pembayaran pajak tersebut. (Selasa, 14 Juli 2020)
Dengan datangnya petugas pemungutan pajak kerumah. (Selasa, 14 Juli 2020)*

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa cara menanamkan perilaku budaya sadar pajak yang tepat dilingkungan masyarakat desa jaya kopah yaitu dengan cara timbulnya kesadaran masyarakat dengan tersendirinya, apabila petugas pemungutan pajak datang kerumah

Berdasarkan observasi yang saya lakukan terhadap bagaimana cara menanamkan perilaku budaya sadar pajak yang tepat dilingkungan masyarakat desa jaya kopah dengan cara Dengan cara melalui pendidikan agar terbentuk karakter generasi bangsa yang cinta tanah air melalui kesadaran melaksanakan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan jadilah masyarakat yang taat membayar pajak

Selanjutnya pada dasarnya wajib pajak mengetahui bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah desa digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan demi menjalankan kelangsungan hidup serta meningkatkan mutu kehidupan, namun budaya sadar pajak didesa jaya kopah sudah terpenuhi, pertanyaannya yaitu Apakah budaya sadar pajak sudah terpenuhi oleh

masyarakat desa jaya kopah berikut kutipan wawancara penulis dengan bapak Matnur selaku Kepala Desa jaya kopah, Bapak Erick Guspi Yondra selaku Sekretaris, Bapak Radius selaku BPD, Bapak Deka Yumadi selaku Kepala Dusun Murbai, Bapak Ali Wardana selaku Kepala Dusun Linjuang, Bapak Masriadi selaku Kepala Dusun Bukit Termenung, Dan Ibu Resmawati selaku Masyarakat:

Menurut saya,beberapa masyarakat sudah memenuhi budaya sadar pajak yang belum hanyalah beberapa masyarakat saja.(Jum'at, 17 juli 2020)

Menurut saya,sudah terpenuhi,karena masyarakat sudah mengerti akan kegunaan pajak tersebut oleh masyarakat.(sabtu,18 juli 2020).

Terkait dengan sudah terpenuhi budaya sadar pajak,masyarakat sudah terpenuhi dan sudah berjalan dengan baik.(sabtu,18 juli 2020).

Menurut saya,sudah terpenuhi,karena sudah dijalankan dengan baik.(Selasa, 14 Juli 2020).

Sudah terpenuhi,karena masyarakat sudah mengerti akan kegunaan pajak tersebut. (Selasa, 14 Juli 2020).

Menurut saya,sudah terpenuhi,sudah baik dan sudah berjalan dengan semestinya.(Selasa, 14 Juli 2020).

Sudah terpenuhi,karena masyarakat sudah mengerti akan kegunaan pajak tersebut.(Selasa, 14 Juli 2020).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa apakah budaya sadar pajak sudah terpenuhi oleh masyarakat di desa jaya kopah,sudah terpenuhi dan sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan observasi yang saya lakukan terhadap terhadap budaya sadar pajak sudah terpenuhi di desa jaya kopah,budaya sadara pajak di desa jaya kopah sudah terpenuhi,hanya beberapa masyarakat saja yang belum paham akan kegunaan pajak tersebut.

Berkaitan dengan indikator kepercayaan terhadap budaya tertentu yang diberikan informan kebanyakan hampir sama yang bermakna pada satu kesimpulan saja, pada pertanyaan pertama tentang bagaimanakah kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak dan fungsinya. mengatakan sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak sudah mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan, masyarakat sudah percaya terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa jaya kopah yang dipungut oleh petugas pajak. pada jawaban dari pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara menanamkan budaya sadar pajak yang tepat di lingkungan masyarakat. yaitu dengan cara datangnya petugas pemungutan pajak kerumah, untuk memintak pembayaran pajak bumi dan bangunan. pada jawaban dari pertanyaan yang ketiga yaitu apakah budaya sadar pajak sudah terpenuhi oleh masyarakat. pada dasarnya wajib pajak mengetahui bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah desa digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan demi menjalankan kelangsungan hidup serta meningkatkan mutu kehidupan, namun budaya sadar pajak di desa jaya kopah sudah terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan terhadap pengelolaan pajak dan fungsinya di desa jaya kopah, kepuasan masyarakat terhadap kepercayaan pemerintah dalam pengelolaan pajak sudah cukup baik. pada dasarnya masyarakat desa jaya kopah sudah percaya atau merasa puas dengan kinerja pemerintahan desa jaya kopah dalam mengembangkan dan mengawasi kewajiban dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan. selanjutnya

observasi yang saya lakukan terhadap bagaimana cara menanamkan perilaku budaya sadar pajak yang tepat di lingkungan masyarakat desa jaya kopah dengan cara Dengan cara melalui pendidikan agar terbentuk karakter generasi bangsa yang cinta tanah air melalui kesadaran melaksanakan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan jadilah masyarakat yang taat membayar pajak

Berdasarkan hasil wawancara tentang perilaku budaya sadar pajak, bahwa kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa jaya kopah sudah baik, namun perlu dijaga dan dilestarikan usaha pemerintahan desa dalam memberikan wawasan mengenai manfaat dan pentingnya pajak bumi dan bangunan bagi pembangunan serta sistem pengelolaan. selanjutnya observasi yang saya lakukan terhadap terhadap budaya sadar pajak sudah terpenuhi di desa jaya kopah, budaya sadara pajak di desa jaya kopah sudah terpenuhi, hanya beberapa masyarakat saja yang belum paham akan kegunaan pajak tersebut.

Berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa jaya kopah yang diberikan sudah baik saat penulis ada dilapangan terlihat dengan masyarakat tidak ada yang mengeluh dengan pel;ayanan yang diberikan pemerintah desa selama ini.

5.3 Analisa Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan ukuran penilaian yang peneliti buat maka pada item penilaian cukup berpartisipasi yaitu apabila semua indikator dalam penelitian ini terpenuhi dan berjalan dengan baik sesuai dengan indikator pengetahuan dan keahlian, pekerjaan masyarakat, pendidikan dan buta huruf, jenis kelamin, dan kepercayaan terhadap budaya tertentu. pada item penelitian cukup berpartisipasi apabila tiga dari lima indikator yang ada berjalan dengan berpartisipasi. pada item penilaian kurang berpartisipasi, apabila hanya satu dari lima indikator yang ada berjalan dengan berpartisipasi. dan pada item penilaian tidak berpartisipasi apabila semua indikator dalam penelitian yaitu pengetahuan dan keahlian, pekerjaan masyarakat, pendidikan dan buta huruf, jenis kelamin, dan kepercayaan terhadap budaya tertentu sudah cukup berjalan dengan baik. maka berdasarkan penjelasan diatas hasil penelitian yang peneliti lakukan berada pada aitem penilaian cukup berpartisipasi.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti lakukan mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai lokasi penelitian, maka peneliti mengambil kesimpulan dalam penelitian ini bahwa dalam pelaksanaan pajak bumi dan bangunan di Desa Jaya Kopah yaitu cukup berpartisipasi.

6.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan sebagai masukan terhadap kualitas pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020.

1. Bagi kepala desa agar tidak bertindak melawan hukum yang salah satunya berkenaan dengan pajak bumi dan bangunan, selalu memantau dan memberikan bimbingan kepada bawahannya yang bertindak sebagai pelaksana dalam pelaksana pajak bumi dan bangunan, memaksimalkan elemen-elemen masyarakat desa yang dirasa dapat mendukung pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya.
2. Bagi sekretaris desa dan bendahara desa agar dapat memaksimalkan apa yang ada dalam pelaksanaan pajak bumi dan bangunan, gunakan kelebihan yang ada untuk menutupi kendala yang menghadang dan yang terpenting adalah lakukan pengelolaan dan penata usahaan pajak bumi dan bangunan

Desa Jaya Kopah dengan baik dan benar demi pembanhunan desa yang berkelanjutan.

3. Dalam pengetahuan dan keahlian harus lebih ditingkatkan lagi. memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak atas objek pajak yang mereka miliki atau manfaatkan.wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah,jadi sebagai warga Negara yang merupakan bagian dari sebuah daerah yang membayar pajak juga dapat di artikan kesadaran untuk turut serta dalam pembangunan jadi pembayaran pajak bumi dan bangunan harus tau oleh masyarakat desa mengetahui yang seharusnya diketahui.
4. Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi bisa lebih baik lagi untuk kedepannya demi terwujudnya pajak bumi dan bangunan.

1.BUKU

Dwiningrum.2011. *Partisipasi Sebagai Keterlibatan Mental*. jakarta : pustaka belajar

Edison,dkk.2016. *Organisasi Kesatuan Entity*. Bandung : focus media

Huraerah.abu.2008. *Pengorganisasian dan Pembangunan Masyarakat,Model Strategis Pembangunan*. Bandung : humoniora

Ismail,Indra,2001. *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*. Jakarta : PT Elex media koputindo-kelompok Gramedia

Kartasapoetra, G.1989.*Pajak Bumi dan Bangunan*. jakarta : Bina Aksara

Mardiasmo,2011. *Perpajakan Edisi Revisi*.2011. yogyakarta : Andi offest

Puspita,Andreas Hendro. Dkk. 2010. *Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Para Praktisi*. jakarta : mitra wancana media

Pudyatmoko,Sri,2002. *Pengantar Hukum Pajak*. yogyakarta : andi

Rochmat,Soemitro,,2001. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung : Redika

Robbins,Edison,,2016.*Organisasi*.CV Pustaka Setia : Bandung.

Sugiono.2014. *Metode Penelitian (Pendekatan Kualitatif)*. Bandung : CV Alfabeta

Siahaa. Marihot pahala SJ.2009.*Pajak Bumi dan Bangunandi Indonesia Teori dan Praktik*. yogyakarta : graha ilmu

Silalahi.2012. *Penyajian Data*. Bandung:Raja Wali pers

Silalahi.2012. *Reduksi Data*.Bandung : Raja Wali Pers

Silalahi.2012.*Penarikan Kesimpulan*. Bandung : Raja Wali Pers

Sondang P .Siagian. 2002.*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Binapura Aksara :
Jakarta

Sri,Valentina Dan Aji Suryo,2006, *Perpajakan Indonesia*,Semba Empa : Jakarta

Syafii.2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. jakarta : bumi aksa

Theresia,2014 *Partisipasi Dalam Pembangunan*.Pustaka Pelajar : Yogyakarta

Tjahyono,Achmat,dan Wahyudi,Triyono 2004. *Perpajakan Indonesia*,Jakarta : PT
Grafindo persad

Waluyo.2011. *Pajak Indonesia*. jakarta:salemba Empat

Waluyo.2002.*Unsur Pajak*. Jakarta : Binapura Aksara

William N Dunn.2009. *Evaluasi Penaksiran*. jakarta:Riany Nugroho

2.PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan
pertama undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan
bangunan.jakarta

Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan

3.Website :

<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>

Pajak.go.id. Pajak Bumi dan Bangunan. Minggu 1 januari 2015.

<https://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-ketentuan-umum-pajak-bumidan-bangunan-pbb>

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=teori+sumber+daya+manusia>

<https://www.online-pajak.com/sistem-pemungutan-pajak>

Daftar Wawancara

Penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Responden Yth.

Dengan segala kerendahan hati maka kami memohon kesediannya untuk bersedia untuk di wawancarai.jawaban anda tidak berpengaruh apapun terhadap nama baik anda.semogah jawaban bapak/ibu/saudara/I dipakai untuk perbaikan di masa yang akan datang.

I. Identitas peneliti

Nama : NERI USMANIATI
Npm : 160411074
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 22 Tahun
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Universitas : Universitas Islam Kuantan Singingi
Alamat : Jaya Kopah
Nomor Hp/Wa : 0822-8816-0718
Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

II. Identitas informan

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Tingkat pendidikan :
Jawaban/pekerjaan :

Masa kerja :

Alamat :

III.Petunjuk

- 1.Daftar pertanyaan ini hanya dimaksud untuk menuliskan skripsi dan tidak merugikan siapapun dan dimasukkan untuk syarat pengumpulan data informasi sehubungan dengan penulisan penelitian ilmiah.
- 2.Hasil wawancara dalam penelitian ini diharapkan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait terutama penulis.
- 3.Identitas Bapak/Ibu/Saudara/i dijamin kerahasiaan
- 4.Atas kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/I saya ucapkan terima kasih

IV.Pertanyaan

A.Indikator pengetahuan dan keahlian

- 1.Bagaimanakah pengetahuan Bapak/Ibu terhadap pentingnya pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa jaya kopah?

.....
.....
.....

- 2.Bagaimanakah keahlian petugas dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa jaya kopah?

.....
.....
.....

- 3.Bagaimanakah pengetahuan dan kewenangan masyarakat desa jaya kopah dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan?

.....
.....
.....

B.Indikator pekerjaan masyarakat

- 1.Apa saja pekerjaan masyarakat di desa jaya kopah?

.....
.....
.....

2. Apakah pendapatan/penghasilan masyarakat jaya kopah sudah terpenuhi?

.....
.....
.....

3. Apakah dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dilihat dari pendapatan masyarakat?

.....
.....
.....

C. Indikator pendidikan dan buta huruf

1. Bagaimanakah tingkat pendidikan di desa jaya kopah?

.....
.....
.....

2. Bagaimanakah cara masyarakat desa jaya kopah untuk mengurangi angka buta huruf?

.....
.....
.....

3. Apakah tingkat pengangguran masih banyak di desa jaya kopah?

.....
.....
.....
.....

D. Indikator jenis kelamin

1. Apakah laki-laki desa jaya kopah ikut serta dalam musyawara pajak bumi dan bangunan?

.....
.....
.....

2. Bagaimanakah peranan perempuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

.....
.....
.....

3. Berapakah jumlah jenis kelamin laki-laki di desa jaya kopah?

.....
.....
.....

E. Indikator kepercayaan terhadap budaya tertentu

1. Bagaimanakah kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak dan fungsinya di desa jaya kopah?

.....
.....
.....

2. Bagaimana cara menanamkan perilaku budaya sadar pajak yang tepat dilingkungan masyarakat desa jaya kopah?

.....
.....
.....

3. Apakah budaya sadar pajak sudah terpenuhi oleh masyarakat di desa jaya kopah?

.....
.....
.....

Penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Foto-foto kantor desa jaya kopah,perangkat dan masyarakat desa jaya kopah



Kantor desa jaya kopah kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi



Wawancara dengan Bapak Kepala desa jaya



Wawancara dengan ibu Sri dempika selaku masyarakat desa jaya



Wawancara dengan ibu hayatul nufus selaku masyarakat desa jaya kopah



Wawancara dengan ibu kurniati selaku masyarakat desa jaya kopah



Wawancara ibu Irma yanti selaku masyarakat desa jaya kopah

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

01047216

BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMERIKAN HAR

AKUN : 411311

020 PERESAHAN

143571DA12B1501/01

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2020

NOP: 14.12.020.008.001-0046.0

LETAK OBJEK PAJAK
LD DSN MURSAI
BT 000 RW 00
JAYA
KUANTAN TENGAH
KUANTAN SINGINGI

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
DESRIANI
DSN MURSAI
BT 000 RW 00
JAYA
KUANTAN SINGINGI
NEMWP: BELUM ADA

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	400	085	5.000	2.000.000
BANGUNAN	50	02B	365.000	18.250.000
				20.250.000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB =				20.250.000
NJOPTRK (NJOP Tidak Kena Pajak)				10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB				10.250.000
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)				13.440.000
PBB yang terhutang				13.440.000

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)
TIDAK BELAK RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH RUPIAH

TEL. JATUH TEMPO : 31 OKT 2020

TEMPAT PEMBAYARAN :
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BANK RIAU KEPRI, BNI
DAN/ATAU BRI

TELUK KUANTAN, 01 APR 2020

KEMERIA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DESRIN ALDI, AP, N, IP
NIP. 19740429 199311 1 001

NAMA WP : DESRIANI KUANTAN TENGAH
Letak Objek Pajak : Kecamatan JAYA
NCP : 14.12.020.008.001-0046.0
SPPT Tahun/Rp. : 2020 - 017 13.440

Diterima tgl
Tanda Tangan :
(.....)
Nama Terang

Surat pemberitahuan pajak terhutang



Petugas pemungutan pajak pajak bumi dan bangunan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Neri Usmaniati
Tempat/Tanggal Lahir : Jaya,8 mei 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jaya Kopah kecamatan Kuantan Tengah
Pendidikan : 1.SD N 017 Jaya Kopah 2010
2.SMP N 06 Teluk Kuantan 2013
3.SMKN 2 Teluk Kuantan 2016



Demikianlah Riwayat ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan,10 agustus 2020

Penulis,

Neri Usmaniati
160411074